



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEBUTUHAN INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA DI SUMATERA BARAT**

**TESIS**



**WILLY NOFRANITA  
0821221008**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERISTA ANDALAS  
PADANG  
2010**

KEBUTUHAN INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

DI SUMATERA BARAT

Oleh :

WILLY NOFRANITA

0821221008

Dibawah Bimbingan :  
Dr. Yurniwati SE, M.Si, Ak dan Suhandi SE, M.Si, Ak

RINGKASAN

Berdasarkan data BPK (2009), sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan oleh DPRD, apakah sudah tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan fungsinya bagi DPRD akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Ini akan bermanfaat dalam menentukan tingkat kepentingan informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan ke DPRD, dimana belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Walaupun studi ini tidak menjelaskan nilai berupa angka dari informasi tersebut, namun dengan mengetahui informasi yang dibutuhkan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

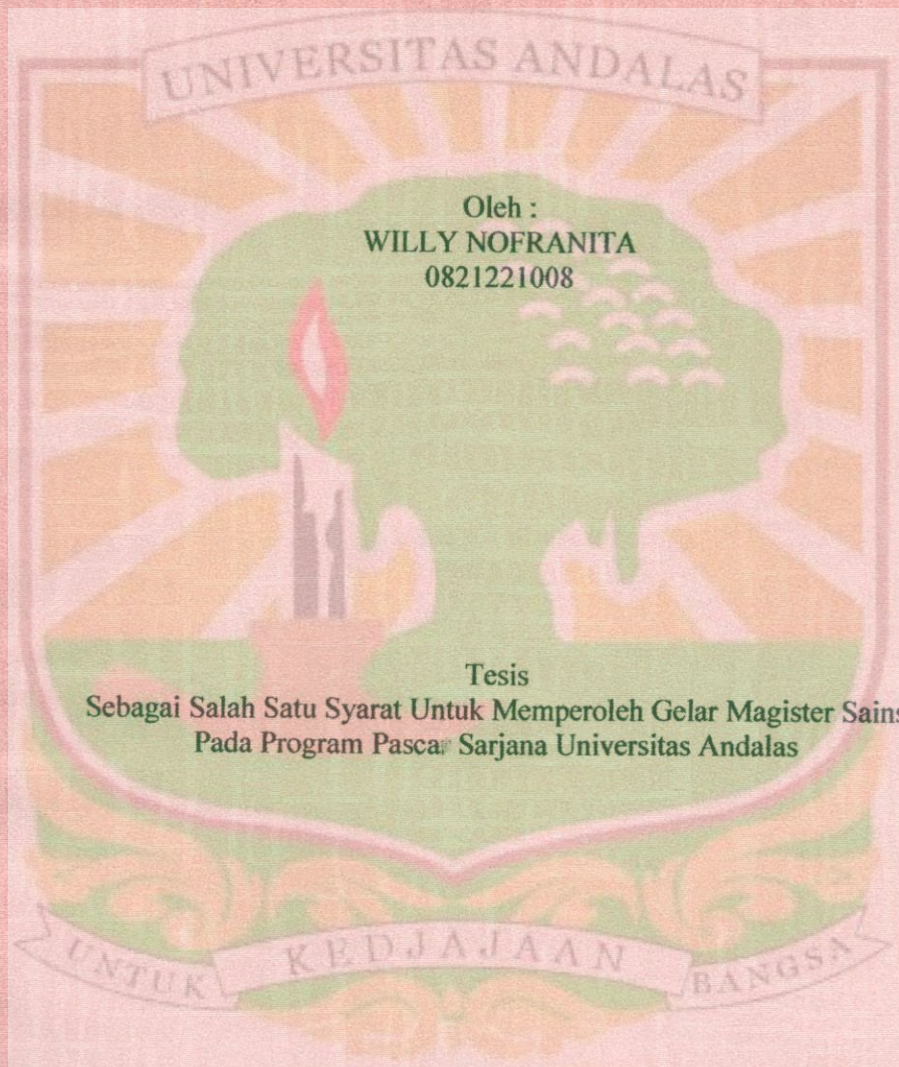
Dengan menggunakan penilaian kualitatif, maka dapat diketahui jenis informasi yang sangat dibutuhkan oleh DPRD, baik yang sudah tercantum maupun yang belum tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Seringnya asset dan program sebagai pengecualian dalam penilaian oleh BPK menyebabkan DPRD menerapkan berbagai kebijakan dan rekomendasi agar hal tersebut dapat segera diatasi. Informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan anggaran dan informasi keuangan merupakan informasi yang sangat dibutuhkan oleh DPRD. Semakin akuntabel dan transparan informasi yang disampaikan maka semakin sedikit informasi yang dibutuhkan oleh DPRD.

Informasi yang sangat dibutuhkan terkait dengan informasi kepatuhan dalam pelaksanaan APBD terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Informasi kinerja untuk mengetahui perbandingan kinerja pemerintah daerah setiap tahunnya dan efisiensi program. Informasi perencanaan anggaran mengenai informasi target penerimaan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran dimasa datang, dan informasi keuangan terutama menyangkut nilai aktiva yang dimiliki pemda.

Keywords: Informasi Dalam Laporan Keuangan Pemda, Akuntabilitas, Transparansi



**KEBUTUHAN INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH BAGI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA DI SUMATERA BARAT**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul :

**"KEBUTUHAN INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT"**

Adalah hasil kerja/ karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/ karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, September 2010  
Yang membuat pernyataan

Willy Nofranita





## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 26 November 1972 di Padang Sumatera Barat, sebagai anak pertama dari pasangan Papa Muhammad Yusran dan Mama Rukmiarni. Penulis memiliki empat orang saudara laki-laki Febri Ronaldi, Yosmei Darsoni, Rukiati dan Rizki Yunanda. Penulis menamatkan pendidikan pada SDN 50 pada tahun 1985, SMPN 5 tahun 1988 dan SMAN 3 pada tahun 1991 di Kota Padang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang tahun 1998. Penulis memiliki dua orang anak Cindi Willyani April (12 tahun) dan Rully Kaffatul Ulya (8 tahun).

Dari tahun 2004 sampai sekarang penulis menjadi dosen luar biasa pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STMIK) Indonesia dan pernah menjadi dosen Bahasa Perancis pada Akademi Bahasa Asing Alaska dari tahun 2006-2008. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) Padang dengan sponsor pribadi.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis dengan judul “KEBUTUHAN INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DI SUMATERA BARAT” ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Novirman Jamarun, M.Sc, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas beserta jajarannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
2. Ibu Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, sebagai ketua komisi pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Suhandi, SE, M.Si, Ak, sebagai anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberikan sumbang saran dan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini.
4. Papa dan Mama serta adik-adik Ronal, Yosmei, Rukiati, Nanda dan kedua putera-puteriku tercinta Cindi dan Fatul yang telah memberikan semangat selama ini.
5. Teman-teman angkatan 2008 Program Studi Akuntansi (Akuntansi Pemerintahan), “Je t’aimes beaucoup (I Love You All)”.

Padang, September 2010

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Batasan Penelitian .....	10
1.6. Sistematika Pembahasan.....	10

### **BAB II KERANGKA TEORITIS**

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	12
2.2 Tujuan/Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ...	15
2.3 Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	19
2.3.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	19
2.3.2 Neraca .....	20
2.3.3 Laporan Arus Kas .....	23
2.3.4 Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
2.4 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	27
2.5 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	31

2.6	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	33
2.6.1	Kedudukan dan Fungsi DPRD .....	33
2.6.2	Tugas dan Wewenang DPRD .....	34
2.6.3	Alat Kelengkapan DPRD .....	35
2.6.4	Pengawasan Oleh DPRD .....	40
2.7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	45
2.7.1	Struktur APBD .....	45
2.7.2	Pertanggungjawaban APBD .....	49

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Desain Penelitian .....	53
3.2	Variabel dan Pengukuran .....	53
3.2.1	Variabel .....	53
3.2.2	Pengukuran Variabel .....	54
3.3	Penentuan Populasi dan Sampel .....	55
3.3.1	Penentuan Populasi Responden .....	55
3.3.2	Teknik Pengambilan Sampel .....	55
3.4	Data .....	56
3.4.1	Jenis Data .....	56
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5	Metode Analisis Data .....	58
3.5.1	Uji Normalitas .....	58
3.5.2	Pengujian Validitas dan Reliabilitas .....	58
3.5.3	Analisis Deskriptif .....	59



## **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1	Profil Responden .....	62
4.2	Hasil Analisis Data .....	65
4.2.1	Pengujian Asumsi Normalitas Data .....	65
4.2.2	Hasil Pengujian Validitas .....	66
4.2.3	Hasil Pengujian Reliabilitas .....	70
4.3	Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	70
4.4	Analisa Deskriptif Jawaban Responden .....	72
4.5	Interpretasi Hasil Penelitian .....	86

## **BAB V PENELITIAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI**

### **PENELITIAN**

5.1	Kesimpulan .....	95
5.2	Saran .....	96
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	97
5.4	Implikasi Penelitian .....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

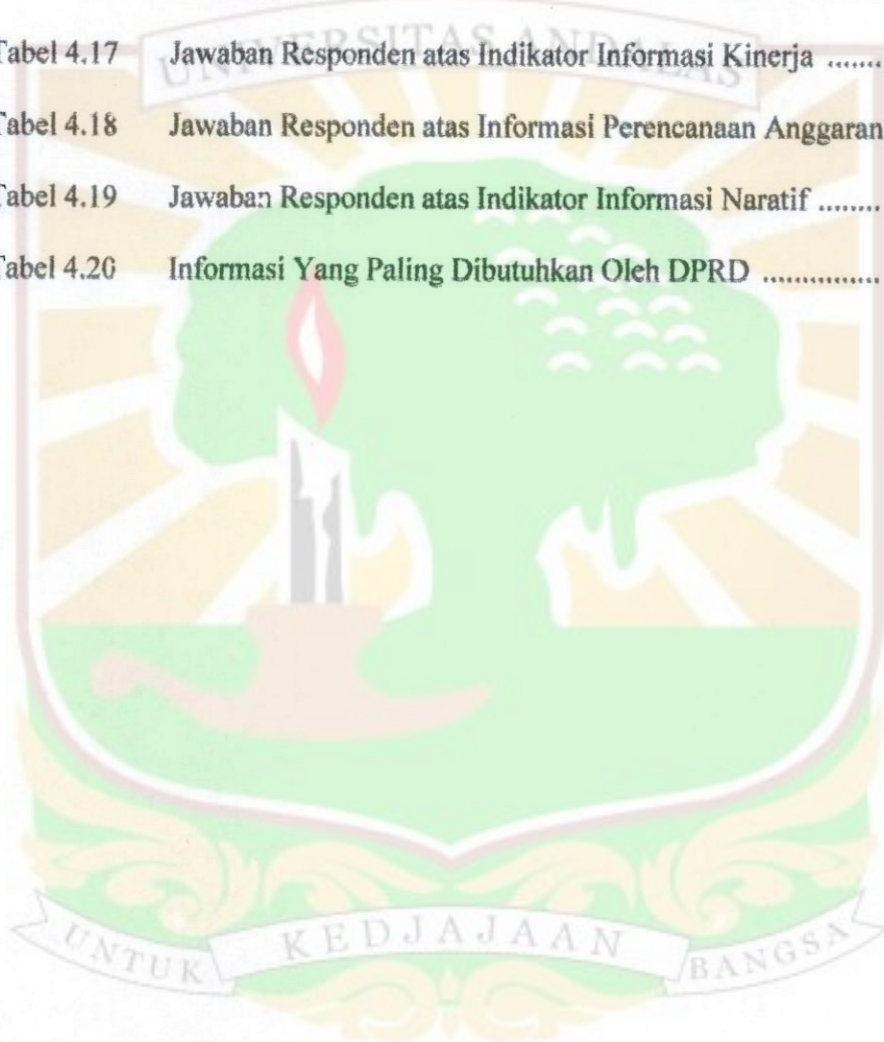
### **DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan Informasi Bagi Pengguna LKPD .....	13
Tabel 2.2	LHP-LKPD Tahun 2008 .....	14
Tabel 2.3	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006-2008 .....	15
Tabel 3.1	Variabel .....	54
Tabel 3.2	Skor Jawaban Kuesioner Variabel Informasi Dalam Laporan Keuangan .....	55
Table 3.3	Penilaian Kualitatif .....	59
Tabel 4.1	Jumlah Anggota Badan Anggaran .....	63
Table 4.2	<i>Response Rate</i> Responden .....	64
Table 4.3	Profil Responden Berdasar Tingkat Pendidikan .....	64
Table 4.4	Profil Responden Berdasarkan Pengalaman Sebagai Anggota Dewan .....	65
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Normalitas Data .....	66
Table 4.6	Hasil Pengujian Validitas Informasi Kondisi Keuangan ....	67
Table 4.7	Hasil Pengujian Validitas Informasi Kondisi Ekonomi .....	67
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Validitas Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan .....	68
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Validitas Informasi Kinerja .....	68
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Validitas Informasi Perencanaan Anggaran	69
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Validitas Informasi Naratif .....	69
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Reliabilitas .....	70



Tabel 4.13	Jawaban Responden atas Kebutuhan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	75
Tabel 4.14	Jawaban Responden atas Indikator Informasi Keuangan ...	76
Tabel 4.15	Jawaban Responden atas Indikator Informasi Ekonomi .....	77
Tabel 4.16	Jawaban Responden atas Indikator Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan .....	78
Tabel 4.17	Jawaban Responden atas Indikator Informasi Kinerja .....	79
Tabel 4.18	Jawaban Responden atas Informasi Perencanaan Anggaran	80
Tabel 4.19	Jawaban Responden atas Indikator Informasi Naratif .....	81
Tabel 4.20	Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh DPRD .....	90



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	27
Gambar 2.2 Struktur APBD .....	49
Gambar 2.3 Pertanggung Jawaban APBD .....	52
Gambar 4.1 Mekanisme penyampaian LKPD Kota Padang .....	71
Gambar 4.2 Mekanisme penyampaian LKPD Kota Bukittinggi .....	72





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Pengujian Normalitas Data
- Lampiran 3 Hasil Pengujian Validitas
- Lampiran 4 Hasil Pengujian Reliabilitas
- Lampiran 5 Hasil Jawaban Responden



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan , pemerintah terus menerus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penata kelembagaan, membenahan sistem dan prosedur dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan dibidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta auditing.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (selanjutnya diamandemen dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada desentralisasi perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya alam dalam anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian daerah.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa



dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat .serta memberi keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat guna mendorong proses pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran serta dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah.

Berdasarkan regulasi yang berlaku di pemerintahan daerah di Indonesia, adanya UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah, setiap realisasi atas kebijakan yang berhubungan dengan *cost* atau belanja (*expenditure*) harus didasarkan pada peraturan resmi yang disebut Peraturan Daerah (Perda).

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten/kota akan membawa konsekwensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah

daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab akan keputusan yang dibuat.

Dengan adanya reformasi keuangan daerah diharapkan pengelolaan keuangan daerah menuju *good governance*, hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan terutama dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan adanya pengawasan stakeholder atas pengelolaan keuangan negara. Adapun bentuk reformasi yang dilaksanakan diantaranya adanya penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah dan pengembangan sumber daya manusia dibidang keuangan.

Tuntutan dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pusat), akan tetapi pada era otonomi daerah ini dan desentralisasi terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical report* menjadi *horizontal report*, yaitu pelaporan kinerja kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Implikasi otonomi daerah lainnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan pemerintah dan dapat dijadikan acuan atau dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berbeda dikalangan stakeholder juga berimplikasi terhadap



perbedaan kebutuhan dari masing-masing pengguna informasi keuangan tersebut, misalnya kebutuhan masyarakat akan berbeda dengan kebutuhan para pengusaha, investor atau DPRD. Saat ini sampai sejauh mana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya tanpa membedakan kepentingan masing-masing.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang, hak, dan kewajiban DPRD. Dalam kapasitasnya, DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan daerah.

Peluang terbesar yang diperoleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan adanya reformasi keuangan daerah adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan mengelola keuangan secara mandiri dan tanpa banyak campur tangan Pemerintah Pusat. Peluang yang muncul terkait dengan status sebagai entitas yang terpisah antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah peluang untuk menunjukkan kemitraan yang baik dan kooperatif antara keduanya. Tantangan yang muncul sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD harus mampu memposisikan dirinya pada posisi yang tepat sesuai peraturan perundangan.

DPRD sebagai representasi rakyat daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mempengaruhi dan memutuskan kebijaksanaan

daerah terutama kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Karena itu sangat dituntut peranan DPRD dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Disamping itu hak dan kewenangan serta fungsi DPRD perlu diefektifkan. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah memberikan peran yang lebih besar kepada DPRD dalam mengevaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah dengan cara memberikan hak kepada DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah dan menindak lanjuti pertanggungjawaban tersebut.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga meningkatkan efisiensi, produktifitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan. Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD salah satunya adalah dengan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Namun saat ini DPRD tidak memandang audit laporan keuangan sebagai suatu kebutuhan. Laporan Keuangan yang disusun instansi pemerintah lebih sekedar pemenuhan kewajiban atau karena perintah dari atasan, sebagai hasilnya kerap tidak optimal dan mendapat penilaian buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan.



DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peranan strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam pengawasan keuangan daerah peranan DPRD sangat besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah.

DPRD sebagai salah satu pemakai laporan keuangan pemerintah juga memiliki kebutuhan akan informasi dalam laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD itu sendiri. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah antara lain informasi keuangan, informasi ekonomi, informasi kepatuhan pada aturan, informasi perencanaan dan penganggaran, dan informasi naratif sangat diperlukan oleh DPRD mengingat fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi legislasi yang merupakan fungsi membuat peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk membuat Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menyusun anggaran yang diwujudkan dalam penyusunan APBD oleh DPRD bersama Kepala Daerah, dan fungsi pengawasan dimana DPRD bertindak sebagai lembaga pengontrol / pengawas pelaksanaan APBD. Untuk itu disamping harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi tersebut juga harus mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders*, menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana yang berasal dari publik. DPRD merupakan

organisasi yang memiliki fungsi membuat anggaran sekaligus pengawas pelaksanaan anggaran tersebut.

Sejauh ini dari beberapa penelitian yang ada belum tercermin jenis informasi apa saja yang dibutuhkan oleh DPRD dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan kegunaan informasi tersebut bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu motivasi yang melandasi penelitian ini adalah pertama, belum ada studi mengenai kebutuhan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bagi DPRD, dimana disini DPRD sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, mitra kerja dan pengawas pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pemda.

Selama ini penelitian-penelitian yang ada masih berfokus kepada *personal* atau diri anggota dewan tersebut, di antaranya penelitian mengenai persepsi anggota dewan terhadap laporan keuangan, tingkat pendidikan dan pengalaman bekerja.

Beberapa penelitian tersebut antara lain Indriani (2002) yang meneliti pengaruh pengetahuan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Jaka Winarna dan Sri Murni (2007) mendapatkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan *personal background* dan latar belakang politik secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.



Penelitian setara yang pernah dilakukan oleh Martiningsih (2009) yang meneliti kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah yang lebih berfokus kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah. Dari hasil penelitiannya Martiningsih menyatakan bahwa informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah adalah informasi kondisi keuangan, kepatuhan terhadap aturan kinerja, perencanaan dan penganggaran serta naratif. Serta Selvi (2009) yang meneliti tentang persepsi legislatif mengenai manfaat laporan keuangan pemerintah daerah, dimana hasilnya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat bagi eksekutif dan legislatif.

Untuk itu dipandang perlu penjelasan lebih mendalam tentang kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai suatu institusi/lembaga yang menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah informasi yang dibutuhkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintahan).
2. Jenis informasi apa saja dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang dibutuhkan oleh DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Apa kegunaan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut bagi DPRD.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintah).
2. Untuk mengetahui jenis informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan DPRD Kota sebagai stakeholder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui kegunaan informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut bagi DPRD.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain.
2. Bagi pemerintahan diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah terutama penyediaan informasi dalam laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya.
3. Bagi DPRD dapat mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintah daerah, sehingga DPRD diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat.
4. Bagi partai politik dapat dijadikan acuan pada saat merekrut calon anggota dewan dan kader partai sehingga anggota DPRD nantinya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.



## **1.5 Batasan Penelitian**

Karena keterbatasan dana dan waktu, penelitian ini dilakukan hanya pada DPRD kota di wilayah provinsi Sumatera Barat. Diharapkan nantinya dapat dilaksanakan untuk semua DPRD kabupaten/kota di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya melakukan penelitian tentang kebutuhan informasi laporan keuangan pemerintah daerah bagi DPRD, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta uraian tentang sistematika penulisan hasil penelitian.

### **BAB II. KERANGKA TEORITIS**

Bab ini berisi kajian dan tinjauan literatur yang mendukung dan mengeksplorasi konsep dan teori serta model penelitian.

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

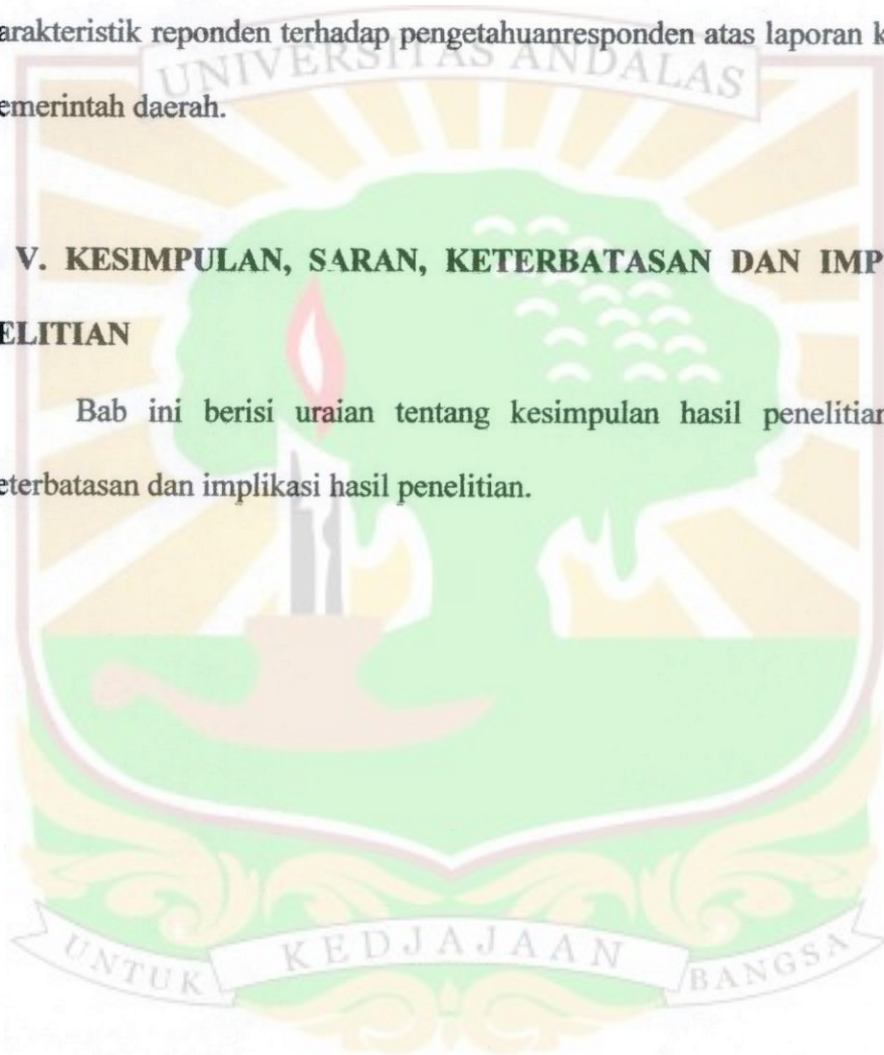
Bab ini berisi uraian tentang bentuk atau disain penelitian yang dilakukan, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel yang digunakan, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **BAB IV. PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan hasil penelitian tentang analisis statistik, analisis deskriptif jawaban responden, deskriptif variabel penelitian, analisis pengaruh karakteristik responden terhadap kebutuhan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan analisis pengaruh karakteristik reponden terhadap pengetahuanresponden atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **BAB V. KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hasil penelitian, saran, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.





## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### 2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan elemen penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Keterlibatannya secara langsung dalam proses pembangunan di masyarakat, menjadikan institusi ini berperan sangat strategis. Terkait dengan hal itu, penyelenggaraan pemerintah di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu, dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak eksternal pemda untuk masa yang akan datang.

Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya-sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan pemerintah merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektifitas dan efisiensi (kinerja) suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagi berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah, informasi yang dibutuhkan tidak hanya sekedar bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam angka-angka, namun juga kondisi-kondisi yang dapat dipengaruhinya, misalnya iklim investasi, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dan lain-lain. Rangkuman yang dibuat oleh Sri Pancawati dalam penelitiannya, ada beberapa kondisi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah atas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan riset-riset terdahulu dan standar-standar akuntansi yang digunakan. Jenis informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kebutuhan Informasi Bagi Pengguna Laporan Keuangan Pemda**

Jenis Informasi	Anthony (1978)	Drebin (1981)	Jones (1985)	Daniels & Daniels (1991)	IFAC-PSC Study (1991)	Mack & Ryan (2006)	IPSAS (2007)
Kondisi Keuangan	√	√	√	√	√	√	√
Kondisi Ekonomi			√		√		√
Kepatuhan terhadap Aturan	√	√	√	√	√	√	√
Kinerja	√	√	√	√	√	√	√
Perencanaan dan Penganggaran		√	√	√	√	√	
Informasi Naratif						√	

Sumber : Martiningsih, 2009



Sedangkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia semester II Tahun 2009 menyimpulkan bahwa perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan kualitas yang buruk. Untuk semester II tahun 2009 dari 189 laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya 4, Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 107, opini Tidak Wajar 11 dan opini Tidak Memberikan Pendapat sebanyak 67. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPK RI dapat dilihat opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**LHP-LKPD Tahun 2008**

OPINI	LHP LKPD Th 2008 yang dilaporkan pada IHP Semester I/2009		LHP LKPD Th 2008 yang dilaporkan pada IHP Semester II/2009		Total LHP-LKPD Th 2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Wajar Tanpa Pengecualian	8	3%	4	2%	12	3%
Wajar Dengan Pengecualian	217	74%	107	57%	324	67%
Tidak Wajar	20	7%	11	6%	31	6%
Tidak Memberikan Pendapat	48	16%	67	35%	115	24%
Jumlah	293	100%	189	100%	482	100%

Sumber : BPK RI

Sedangkan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2006-2008 berdasarkan jumlah dan persentasenya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Tahun 2006-2008**

Laporan Keuang Pemerintah Daerah	OPINI								Jumlah
	WTP		WDP		TW		TMP		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Th 2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
Th 2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	468
Th 2008	12	3%	324	67%	31	24%	115	24%	482

Sumber : BPK RI

Hal ini menggambarkan dari tahun 2006 -2008 adanya perbaikan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah terhadap laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah karena penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

## 2.2. Tujuan/Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.



3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

Mardiasmo (2005) menyatakan secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan secara khusus tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-peubahan yang terjadi didalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaian dengan praturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :
  - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktifitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
  - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktifitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
  - c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktifitas dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
  - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

Tujuan pelaporan keuangan yang dikemukakan dalam lapiran E.II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :



1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

- a. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.

- b. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
- c. Membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
- d. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

### **2.3. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut PP 24 Tahun 2005 jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

yang merupakan produk pokok terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

#### **2.3.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran, mencakup tiga unsur pokok antara lain :

##### **a. Pendapatan**

Semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.



b. Belanja

Semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**2.3.2. Neraca**

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari tiga unsur pokok yakni :

a. Aset

Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

b. Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Dalam neraca kewajiban disajikan dalam dua kelompok besar yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Akuntansi pemerintahan menggunakan basis cash toward acrual, oleh karena itu dalam SAP terdapat tiga kelompok ekuitas dana yaitu :

a. Ekuitas Dana Lancar

Merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Contohnya antara lain :



### 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran.

### 2. Cadangan Piutang

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset lancar berupa piutang, seperti piutang jangka pajak, piutang retribusi, dan piutang lancar lainnya.

### 3. Cadangan Persediaan

Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset lancar berupa persediaan, misal persediaan obat-obatan, ATK, aspal, bahan kimia, dan lain sebagainya.

### 4. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

#### b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

#### c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.3. Laporan Arus Kas**

Tujuan dari penyusunan laporan arus kas adalah agar laporan tersebut dapat menyajikan tentang perkembangan kas yang menjadi informasi keuangan tentang sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan arus kas adalah terdiri dari :

1. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk kedalam kas daerah.
2. Pengeluaran kas merupakan semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

### **2.3.4. Catatan atas Laporan Keuangan**

Jenis laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan rangkuman yang berisikan tentang maksud dan tujuan, landasan hukum maupun tentang kebijakan ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD adalah Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal atau keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, yang dimuat dalam ikhtisar pencapaian kinerja keuangan adalah ikhtisar tentang



realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram.

- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Menurut SAP catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

1. Informai tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Selain itu perlu diungkapkan juga perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR/DPRD.
2. Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus :
  - a. Meliputi hasil positif maupun negatif.
  - b. Menyajikan data historis yag relevan.

- c. Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.
  - d. Menyajikan informasi lainnya yang diyakini oleh manajemen akan dibutuhkan oleh pembaca laporan keuangan untuk dapat memahami indikator, hasil, dan perbedaan yang ada dengan tujuan dan rencana.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Secara umum, kebijakan akuntansi dalam catatan laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut :
- a. Entitas pelaporan.
  - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
  - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
  - d. Perkembangan penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi PSAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan.
  - e. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
4. Pengungkapan informasi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Hal ini diperlukan apabila terdapat informasi penting yang belum atau tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan untuk menghindari adanya kesalahan dalam membaca laporan keuangan.



5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul terkait penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Rekonsiliasi ini bertujuan menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran.

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Informasi tersebut antara lain :

- a. Domisili dan bentuk hukum dari suatu entitas serta yuridiksi tempat entitas itu berada.
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- c. Ketentuan undang-undang yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

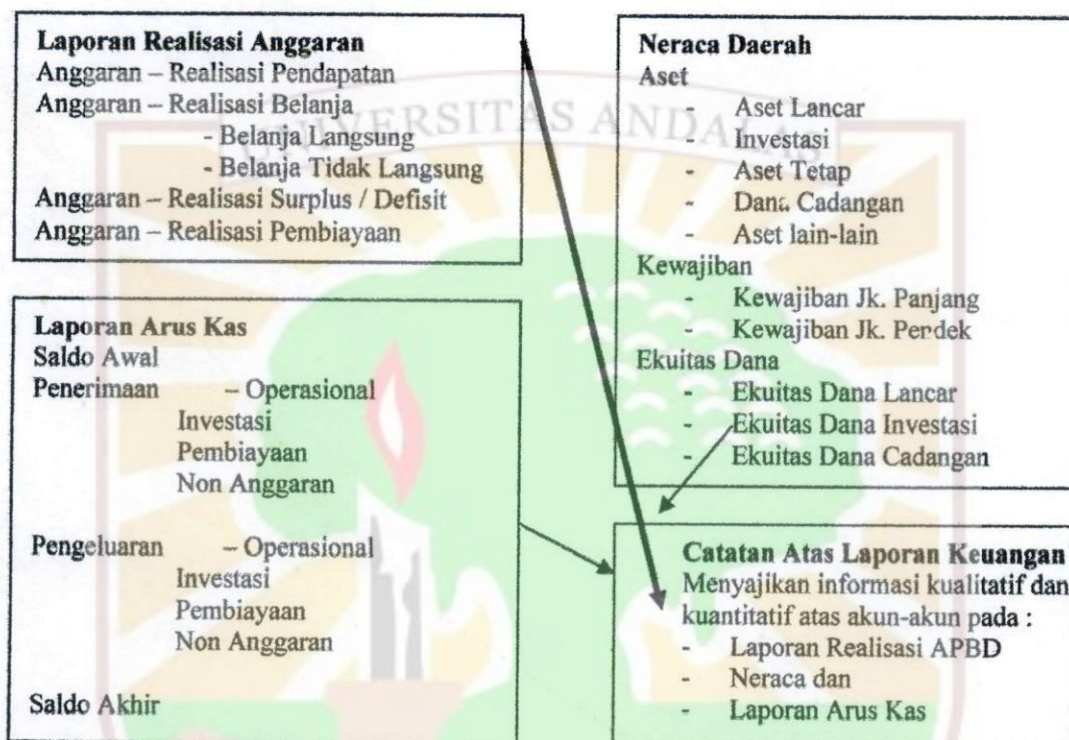
Catatan atas laporan keuangan juga perlu untuk menyajikan informasi yang penting yaitu :

- a. Pergantian manajemen pemerintahan selama satu tahun berjalan.
- b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru.
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada neraca.
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.
- e. Kejadian yang memiliki dampak sosial, seperti adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah, bencana alam dan lain-lain.

7. Daftar dan skedul terkait pelaksanaan anggaran pemerintah.

Selain laporan keuangan pokok tersebut entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Untuk memperjelas wawasan dan pandangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada bagan berikut :



**Gambar 2.1.**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### 2.4. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

##### 1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna



laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan. Informasi yang relevan harus :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictif value*), artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan.
- d. Lengkap, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatar belakangi setiap informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan,

tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Karakteristik informasi yang handal antara lain :

- a. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
  - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.
3. Dapat Diperbandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan



kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

#### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

#### **Kendala informasi yang relevan dan andal**

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal sebagai akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Hal-hal yang dimaksudkan adalah :

##### 1. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Meskipun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

## 2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya.

## 3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

### 2.5. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo mengidentifikasikan 10 pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu

1. Pembayar pajak (*taxpayer*)
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*)
3. Investor
4. Pengguna jasa
5. Karyawan/pegawai
6. Pemasok
7. Dewan Legislatif
8. Manajemen



9. Pemilih (*voters*)

10. Badan Pengawas

Serikat dagang sektor publik GASB (1999) dalam Bastian (2005) mengelompokkan pengguna laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar yaitu :

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
2. Legislatif dan Badan Pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat.
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Halim (2004) mengemukakan pihak-pihak eksternal pemerintah daerah sebagai pemakai laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Badan Pengawas Keuangan
3. Investor, kreditor dan donatur
4. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah
5. Rakyat
6. Pemerintah Pusat
7. Pemerintah Daerah lain

Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2005 membagi pengguna laporan keuangan pemerintah kedalam beberapa kelompok utama, yakni :

1. Masyarakat.
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.
4. Pemerintah.

## **2.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **2.6.1. Kedudukan dan Fungsi DPRD**

#### **Kedudukan DPRD**

1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Perwakilan Daerah.
2. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

#### **Fungsi DPRD**

DPRD sebagai lembaga legislatif secara umum memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Yaitu untuk fungsi membuat peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.

2. Fungsi Anggaran

Yaitu fungsi untuk menyusun anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Kepala Daerah.



### 3. Fungsi Pengawasan

Yaitu fungsi untuk mengawasi kerja eksekutif yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### 2.6.2. Tugas dan wewenang DPRD

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan/atau pemberhentian..
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan Pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- h. Meminta laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.6.3. Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1. Badan Musyawarah

Merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Tugas badan Musyawarah :

- a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.
- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.



- c. Meminta dan /atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

## 2. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

### 3. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Badan Legislasi Daerah bertugas :

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan yang diajukan anggota, komisi daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.



- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan dan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### 4. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Tugas Badan Anggaran :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan

rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah.

e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.

f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### 5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Tugas Badan Kehormatan :

a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.



- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

#### 6. Alat Kelengkapan Lain

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

#### 2.6.4. Pengawasan oleh DPRD

Pengawasan sering dimaksudkan sebagai kontrol, supervisi, monitoring. Dalam konteks DPRD sebagai lembaga politik, fungsi dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknik administrasi. Salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemda dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Sebagai sebuah lembaga/institusi, apabila DPRD ingin menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang pengawasan mestinya dilakukan melalui alat kelengkapan DPRD yang ada, baik

yang bersiat tetap seperti komisi-komisi dan panitia anggaran maupun yang bersifat sementara seperti panitia khusus (pansus), itupun sepanjang tata cara pelaksanaan ketentuan diatur dalam tata tertib DPRD.

Dalam PP Nomor 29 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, pengawasan dilakukan oleh DPRD dalam pasal 43 hanya disebutkan "DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah didalam wilayah kerjanya sesuai dengan perundang-undangan". Untuk menguatkan fungsi pengawasan, diperlukan langkah-langkah :

1. Merumuskan batasan tentang ruang lingkup kerja dan prioritas pengawasan.
2. Merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya.
3. Merumuskan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal, atau menyimpang dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
4. Merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut hasil pengawasan, baik pada tingkat kebijakan, proyek atau kasus-kasus tertentu.

Saat ini sebagai mitra kerja DPRD, Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD melainkan hanya sebatas menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD yang berupa *progress report* kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak lagi dalam kapasitas menerima atau menolak. Dalam



melaksanakan tugas pengawasan tersebut DPRD memiliki bagian khusus yang disebut Panitia Anggaran.

Sebagai representasi rakyat di daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pengawasan dilakukan secara individual maupun secara institusional.

Secara sederhana pengawasan DPRD dibedakan atas :

1. Pengawasan oleh pimpinan DPRD yaitu pengawasan yang dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD yaitu pengawasan yang melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi yaitu pengawasan yang ruang lingkungannya (objeknya) merupakan bidang tugas komisi dan dilaksanakan oleh komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi yaitu pengawasan yang ruang lingkungannya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi tugas lintas komisi dan dilaksanakan oleh 2 komisi atau lebih.
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan oleh Panitia Khusus (Pansus) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD yang dibutuhkan khusus untuk melakukan pengawasan
6. Pengawasan oleh Fraksi.

Kewajiban Kepala Daerah menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh PPKD berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dan selanjutnya diteruskan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Bentuk dan isi laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan laporan keuangan yang disajikan oleh kepala daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan bahwa pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan DPRD yaitu Panitia Kerja. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK meliputi :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu



Sedangkan DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam Panitia Kerja apabila :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Pembahasan tersebut dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

- a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- e. Laporan hasil pembahasan dapat berisi usulan :
  1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan aspek tertentu dan/atau temuan di Satuan Kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
  2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan tersebut dapat berupa :

- a. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan.
- b. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja.
- c. Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pengawasan legislatif dilakukan sesuai tugas dan wewenangnya melalui :

- a. Dengar pendapat (*Public Hearing*)
- b. Rapat Kerja
- c. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Panitia Kerja (Panja)
- d. Pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna.
- e. Kunjungan kerja

## **2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

### **2.7.1. Struktur APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari



digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, serta harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD.

Secara garis besar struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pendapatan Transfer mencakup Dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Lain-lain Pendapatan yang Sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Pendapatan Daerah dan penggunaannya :

- Pendapatan yang bebas digunakan oleh Pemerintah Daerah :
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - Dana Alokasi Umum (DAU)
  - Bagi hasil selain bagi hasil kehutanan untuk reboisasi
  - Bagi hasil dari provinsi untuk Kabupaten/Kota
- Pendapatan dari DAK hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

- Pendapatan Lain-lain berupa dana darurat dari Pusat hanya boleh digunakan untuk kegiatan tanggap darurat pada bencana.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu :

#### 1. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

#### 2. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, belanja modal.

Selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dan sebaliknya jika pendapatan daerah dalam satu tahun diperkirakan lebih kecil dari anggarannya, maka akan terjadi defisit APBD.

Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal daerah, dan pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemda lain. Surplus tersebut juga dapat digunakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus.



Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

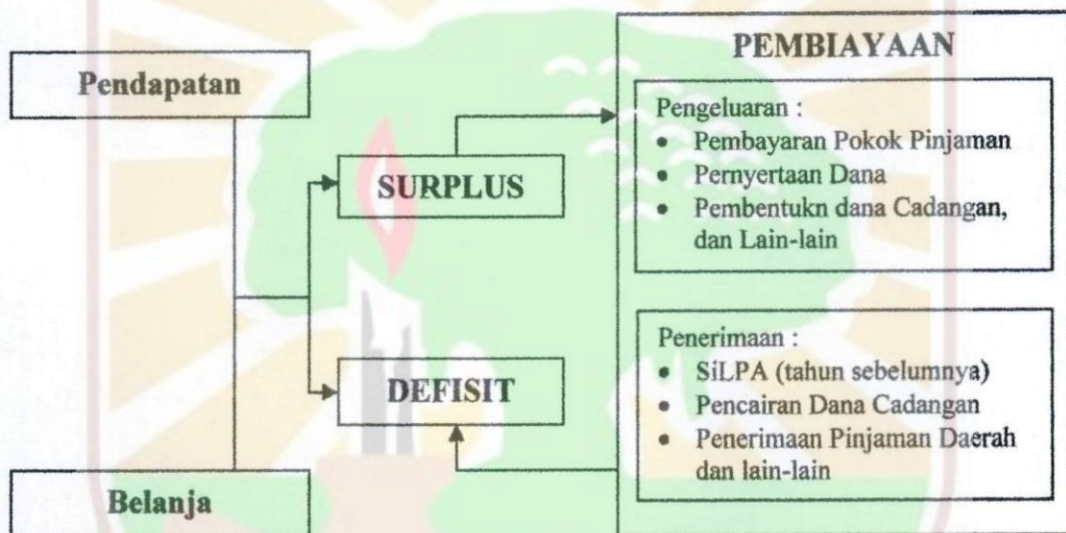
Penerimaan pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
6. Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup :

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penerimaan modal (investasi) daerah
3. Pembayaran pokok hutang
4. Pemberian pinjaman daerah

Berikut merupakan gambar atau skema struktur APBD



**Gambar 2.2**  
**Struktur APBD**

### 2.7.2. Pertanggungjawaban APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 110 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya



paling lambat pada bulan Juli Laporan Keuangan Daerah yang sudah diaudit sudah ada ditangan DPRD. Pokok-pokok pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 antara lain :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi (menyiapkan : Laporan Realisasi APBD, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan).
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Entitas pelaporan).
3. Frekwensi dan cakupan pertanggungjawaban.
4. Laporan Keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam bentuk Raperda kepada DPRD.
5. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kewajiban Kepala Daerah kepada DPRD

1. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban mengenai :
  - a. Pengelolaan Keuangan Daerah
  - b. Kinerja Keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi.

DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawaban dimaksud.

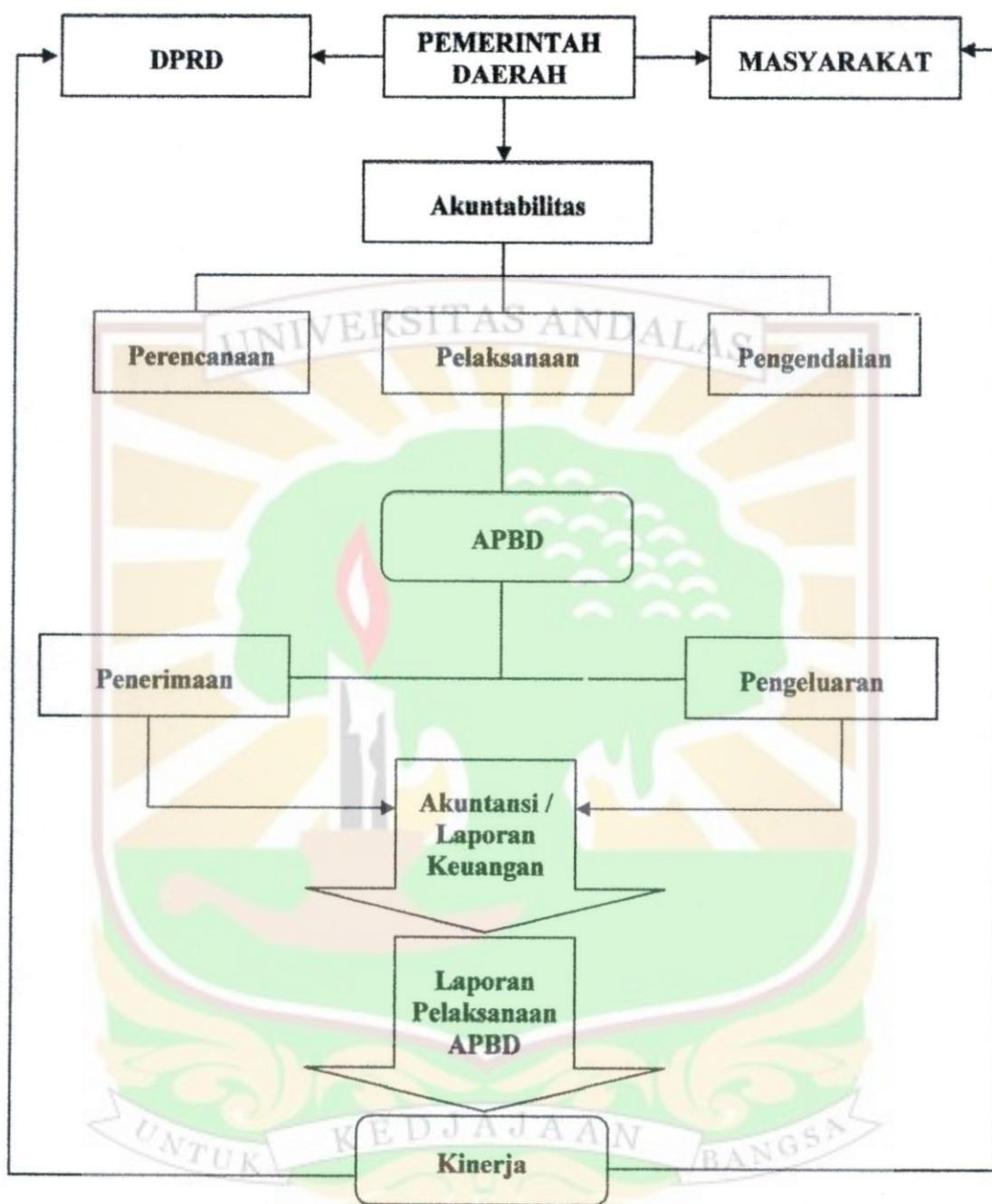
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

3. Menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.







**Gambar 2.3**  
**Pertanggungjawaban APBD**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian

Bertolak dari pokok-pokok permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang meneliti tentang kebutuhan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bagi DPRD.

#### 3.2. Variabel dan Pengukuran

##### 3.2.1. Variabel

Variable dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independent variabel) yaitu *personal background* (tingkat pendidikan dan pengalaman atau masa kerja sebagai anggota DPRD) dan variable terikat (dependent variable) yaitu informasi kondisi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap undang-undang, informasi kinerja, dan informasi naratif.

- **Informasi kondisi keuangan** yaitu informasi mengenai keuangan pemerintah daerah yang bermanfaat untuk menentukan aliran, posisi keuangan dan perubahannya.
- **Informasi kondisi ekonomi** yaitu informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan di dalamnya.
- **Informasi kepatuhan terhadap aturan** yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor sumber dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dan realisasi apakah telah sesuai aturan yang berlaku.



- **Informasi kinerja** yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.
- **Informasi perencanaan anggaran** yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan anggaran dan aktivitas pemerintah.
- **Informasi naratif** yaitu informasi yang berisi *overview* operasional pemerintah dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 3.1**  
**Variabel**

No	Variabel	Jumlah Item
1.	Kondisi Keuangan	9
2.	Kondisi Ekonomi	4
3.	Kepatuhan terhadap Aturan	6
4.	Kinerja	9
5.	Perencanaan Anggaran	6
6.	Informasi Naratif	10

### 3.2.2. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel independen diberikan poin bertingkat 1-4 untuk tingkatan paling rendah sampai tingkat paling tinggi atau dari SMA sampai pasca sarjana. Untuk variabel informasi kondisi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap undang-undang, informasi kinerja, dan informasi naratif, penulis menggunakan instrumen dengan pengukuran skala kategori (*category scale*) yaitu pengukuran sikap yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk memberikan alternatif

penilaian (Indriantoro dan Supomo, 2002:102). Disini penulis menggunakan bobot penilaian 1-5.

**Tabel 3.2**  
**Skor Jawaban Kuesioner Variabel Informasi**  
**Dalam Laporan Keuangan**

Jawaban	Skor
Tidak Penting (TP)	1
Kurang Penting (KP)	2
Cukup Penting (CP)	3
Penting (P)	4
Sangat Penting (SP)	5

### 3.3. Penentuan Populasi dan Sampel

#### 3.3.1. Penentuan Populasi Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pengguna utama laporan keuangan pemerintah daerah. Pihak legislatif sebagai wakil rakyat berdasarkan fungsi-fungsi yang melekat padanya membutuhkan keterangan pertanggungjawaban tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah.

#### 3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel

Adapun sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Badan Anggaran. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgment sampling*). Besarnya sampel yang diambil berdasarkan beberapa pertimbangan :



1. Tingkat keseragaman dari populasi

Populasi yang diambil merupakan DPRD kota, yang memiliki keragaman dari segi item-item yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

2. Kemudahan akses dalam mendapatkan informasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini hanya mengambil sampel anggota Badan Anggaran yang ada di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Dari kelima kota tersebut maka jumlah dari sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 orang.

### 3.4. Data

#### 3.4.1. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data Primer

Data yang terkumpul merupakan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden dan informan kunci di lapangan.

Disini pengumpulan data diperoleh dari jawaban terhadap kuisioner yang dibagikan dan wawancara langsung kepada anggota Badan Anggaran.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari Sekretariat Dewan dan instansi-instansi/ lembaga-lembaga terkait.

#### 3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi dokumenter

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan regulasi (yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi pemerintahan), jurnal atau buletin yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan.

b. Kuesioner(*Questioner*)

Teknik ini digunakan untuk menjangkau data yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk jumlah, angka-angka atau dalam bentuk grafik. Dalam penelitian ini metode penyebaran kuesioner adalah *Personally Administered Quistionaires* yaitu penggunaan kuisisioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden. Paket kuesioner yang disebar terdiri atas dua bagian, yang *pertama* yang berhubungan dengan data demografi responden seperti tingkat pendidikan, jabatan, komisi dan pengalaman duduk sebagai anggota Dewan. *Kedua*, berhubungan dengan jenis informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas dan transparansi. Untuk kuesioner jenis informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah penulis menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sri Pancawati Martiningsih (2009) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan konteks DPRD.

c. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas yang tidak bisa didapatkan melalui kuesioner



### 3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan antara lain :

#### 3.5.1. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh terhadap data bersangkutan. Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov*. Tujuan uji normalitas ini untuk mengetahui apakah variabel yang dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal.

#### 3.5.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

- a. Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, dikatakan valid jika memiliki tingkat valid yang tinggi. Pengujian validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (*construct validity*) karena memiliki pendekatan yang cukup obyektif dan sederhana. Pada pengujian validitas ini menggunakan analisis korelasional untuk mendapatkan validitas konstruk yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total seluruh pernyataan dalam kuisioner. Teknik yang digunakan adalah korelasi Pearson.
- b. Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat pengumpul menunjukkan ketepatan, keakuratan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Untuk uji reliabilitas digunakan pendekatan konsistensi internal. Teknik yang dipakai adalah *coeffisient Cronbach's Alpha*, semakin dekat alfa Cronbach

dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran 2006:177).

Disini pengujian dilakukan dengan menggunakan Program SPSS 16.

### 3.5.3. Analisis Deskriptif

Untuk variabel informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, transparansi dan akuntabilitas, dari setiap jawaban responden penulis menggunakan uji rata-rata terhadap setiap variabel dan memberikan penilaian secara kualitatif dengan pengukuran :

**Tabel 3.3**  
**Penilaian Kualitatif**

Rata-rata	Hasil
5	Penting/Baik
4	
3	Kurang Penting/Kurang Baik
2	
1	Tidak Penting/Tidak Baik
0	

Dari hasil rata-rata penulis menganalisis, menginterpretasikan penilaian diatas dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi/dokumen) yaitu metode pengumpulan dan analisis data terhadap suatu dokumen untuk memperoleh suatu kandungan informasi atau deskripsi secara obyektif dan sistematis.

Untuk menganalisa data tersebut digunakan teknik persentase dari frekwensi dengan rumus yang digunakan :



$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Persentase yang dicari

F = Frekwensi/Jumlah Skor

N = Jumlah Responden

$$\text{Rerata} = \frac{(SP \times 5) + (P \times 4) + (CP \times 3) + (KP \times 2) + (TP \times 1)}{n}$$

Dimana :

SP = Sangat Penting

P = Penting

CP = Cukup Penting

KP = Kurang Penting

TP = Tidak Penting

Untuk mengetahui Tingkat Pencapaian Rata-rata (TCR) responden pada variable penelitian digunakan formula Ridwan (2008) sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = persentase tingkat capaian

X = skor rata-rata

N = jumlah skor maksimal

Dengan kriteria capaian sebagai berikut :

Sangat Penting : jika jawaban responden mencapai skor 84%-100%

Penting : jika jawaban responden mencapai skor 68%-83%

Cukup Penting : jika jawaban responden mencapai skor 52%-67%

Kurang Penting : jika jawaban responden mencapai skor 36%-51%

Tidak Penting : jika jawaban responden mencapai skor 20%-35%

Responden dianggap membutuhkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bila Tingkat Capaian Rata-rata  $\geq 68\%$ .





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota di Sumatera Barat periode 2009-2014 yang duduk dalam Badan Anggaran (Banggar). Penyebaran kuesioner dan pengumpulan data dilakukan selama 6 (enam) minggu terhitung pertengahan Juni 2010 yang disebarkan secara langsung.

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Tugas Badan Anggaran :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapat dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupataen/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah.
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah.
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Keanggotaan badan anggaran di DPRD terdiri dari : unsur pimpinan DPRD (ketua dan wakil ketua), ketua fraksi, dan utusan fraksi yang jumlahnya proporsional dengan jumlah anggota fraksi. Berikut jumlah anggota DPRD kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Anggota Badan Anggaran**

No	Kota	Jumlah
1	Padang	22
2	Pariaman	13
3	Padang Panjang	11
4	Bukittinggi	12
5	Sawahlunto	10
	Jumlah	68

Sumber : data primer diolah



Dari tabel 4.1 dapat dilihat jumlah anggota Badan Anggaran sebanyak 68 orang dengan jumlah terbanyak merupakan anggota Badan Anggaran Kota Padang.

**Tabel 4.2**  
**Response Rate Responden**

Uraian	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	68	100%
Kuesioner yang kembali	57	83,82%
Kuesioner yang tidak bisa diolah	9	15,79%
Kuesioner yang dapat dianalisis	48	84,21%

Sumber : data primer diolah

Dari 68 kuesioner yang disebar kepada responden, yang diterima kembali sebanyak 57 kuesioner (83,82%), 9 kuesioner (15,79%) diantaranya tidak dapat diolah, sehingga kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 48 kuesioner (84,21%). Responden dalam penelitian ini tidak dibedakan menurut tingkat pendidikan dan lamanya responden duduk sebagai anggota dewan.

**Tabel 4.3**  
**Profil Responden Berdasar Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMU/Sederajat	10 orang	20,83%
2	Diploma	3 orang	6,25%
3	Sarjana	28 orang	58,34%
4	Pascasarjana	7 orang	14,58%
	Total	48 orang	100%

Sumber : data primer diolah

Dari tabel profil responden berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan SMU/ sederajat berjumlah 10 orang

(20,83%), Diploma sebanyak 3 orang (6,25%), Sarjana sebanyak 28 orang (58,34%), dan Pasca sarjana sejumlah 7 orang (14,58%). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD periode 2009-2014 sudah lebih baik yakni sekitar 73% mempunyai pendidikan Sarjana S1 dan S2.

**Tabel 4.4**  
**Profil Responden Berdasarkan Pengalaman Sebagai Anggota Dewan**

No	Pengalaman Kerja	Jumlah	%
1	0-5 tahun	30 orang	62,5%
2	5-10 tahun	18 orang	37,5%
3	10-15 tahun	-	
4	>15 tahun	-	
	Total	48 orang	100%

Sumber : data primer diolah

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebesar 62,5% anggota DPRD periode 2009-2014 merupakan anggota yang baru terpilih atau periode pertama dalam masa kerjanya sebagai anggota dewan.

## 4.2 Hasil Analisa Data

### 4.2.1 Pengujian Asumsi Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh terhadap data bersangkutan. Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov*. Tujuan uji normalitas ini untuk mengetahui apakah variabel yang dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas data untuk tiap-tiap indikator dalam penelitian :



**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Normalitas Data**

<b>Indikator</b>	<b>Asymp Sig (2-Tailed)</b>
Informasi kondisi keuangan	0,846
Informasi Kondisi Ekonomi	0,072
Informasi Kepatuhan Terhadap Anggaran	0,053
Informasi Kinerja	0,190
Informasi Perencanaan dan Anggaran	0,379
Informasi Naratif	0,544

Sumber : data primer diolah

Dari hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa variabel memenuhi kriteria distribusi normal dengan sig. > 0,05.

#### **4.2.2 Hasil Pengujian Validitas**

Kualitas data penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Validitas suatu ukuran menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Pengujian validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (*construct validity*) karena memiliki pendekatan yang cukup obyektif dan sederhana. Pada pengujian validitas ini menggunakan analisis korelasional untuk mendapatkan validitas konstruk yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total seluruh pernyataan dalam tiap-tiap kuesioner. Teknik yang digunakan adalah korelasi Pearson (*pearson product-moment*). Instrument dikatakan valid jika koefisien Korelasi Pearson mencapai 0,3 (Sekaran 2006). Berikut merupakan hasil pengujian validitas yang diperoleh melalui program SPSS Versi 16.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengujian Validitas Informasi Kondisi Keuangan**

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
1	0,471	0,001	Valid
2	0,573	0,000	Valid
3	0,372	0,000	Valid
4	0,457	0,001	Valid
5	0,654	0,000	Valid
6	0,456	0,001	Valid
7	0,717	0,000	Valid
8	0,605	0,000	Valid
9	0,503	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil pengujian validitas variabel informasi kondisi keuangan dinyatakan valid dengan nilai Koefisien Korelasi Pearson  $> 0,4$ .

**Tabel 4.7**  
**Hasil Pengujian Validitas Informasi Kondisi Ekonomi**

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
1	0,446	0,002	Valid
2	0,663	0,000	Valid
3	0,660	0,000	Valid
4	0,665	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Untuk hasil pengujian validitas variabel informasi kondisi ekonomi dari tabel diatas dikatakan valid dengan Koefisien Korelasi Pearson  $> 0,6$ .



**Tabel 4.8**  
**Hasil Pengujian Validitas Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan**

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
1	0,810	0,002	Valid
2	0,583	0,000	Valid
3	0,635	0,000	Valid
4	0,700	0,000	Valid
5	0,645	0,000	Valid
6	0,443	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil pengujian validitas indicator informasi kondisi ekonomi dinyatakan valid dengan nilai koefisien  $> 0,4$ .

**Tabel 4.9**  
**Hasil Pengujian Validitas Informasi Kinerja**

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
1	0,559	0,000	Valid
2	0,576	0,000	Valid
3	0,511	0,000	Valid
4	0,510	0,000	Valid
5	0,411	0,004	Valid
6	0,432	0,002	Valid
7	0,348	0,015	Valid
8	0,573	0,000	Valid
9	0,395	0,005	Valid

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil pengujian validitas indikator informasi keuangan dinyatakan valid dengan nilai koefisien  $> 0,3$ .

**Tabel 4.10**  
**Hasil Pengujian Validitas Informasi Perencanaan Anggaran**

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
1	0,449	0,001	Valid
2	0,647	0,000	Valid
3	0,586	0,000	Valid
4	0,574	0,000	Valid
5	0,393	0,006	Valid
6	0,573	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil pengujian validitas indicator informasi perencanaan anggaran dapat dikatakan valid karena nilai koefisien  $> 0,3$ .

**Tabel 4.11**  
**Hasil Pengujian Validitas Informasi Naratif**

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Keterangan
1	0,318	0,028	Valid
2	0,511	0,000	Valid
3	0,508	0,000	Valid
4	0,374	0,009	Valid
5	0,417	0,003	Valid
6	0,314	0,030	Valid
7	0,334	0,020	Valid
8	0,379	0,008	Valid
9	0,406	0,004	Valid
10	0,434	0,001	Valid

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil pengujian validitas indikator informasi naratif dapat dikatakan valid dengan nilai koefisien  $> 0,3$ .



### 4.2.3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat pengumpul menunjukkan ketepatan, keakuratan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala-gejala tertentu walaupun dilakukan pada waktu berbeda. Untuk uji reliabilitas digunakan pendekatan konsistensi internal. Teknik yang dipakai adalah *coefficient Cronbach's Alpha*, semakin dekat alfa Cronbach dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal, untuk uji reliabilitas suatu instrument dikatakan reliabel jika mencapai Cronbach's Alpha 0,5 (Sekaran 2006:177).

**Tabel 4.12**  
**Hasil Pengujian Reliabilitas**

<b>Pernyataan</b>	<b>Cronbach Alpha</b>
Kondisi Keuangan	0,714
Kondisi Ekonomi	0,515
Kepatuhan Terhadap Aturan	0,689
Kinerja	0,623
Perencanaan dan Penganggaran	0,504
Naratif	0,535

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian reliabilitas terhadap instrument penelitian diperoleh nilai Cronbach's Alpha  $> 0,5$ , maka instrument penelitian dapat dikatakan reliabel.

### 4.3 Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mekanisme penyampaian dan pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah berbeda untuk setiap kota sesuai dengan tatib dan kebijakan yang diambil oleh masing-masing DPRD. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah

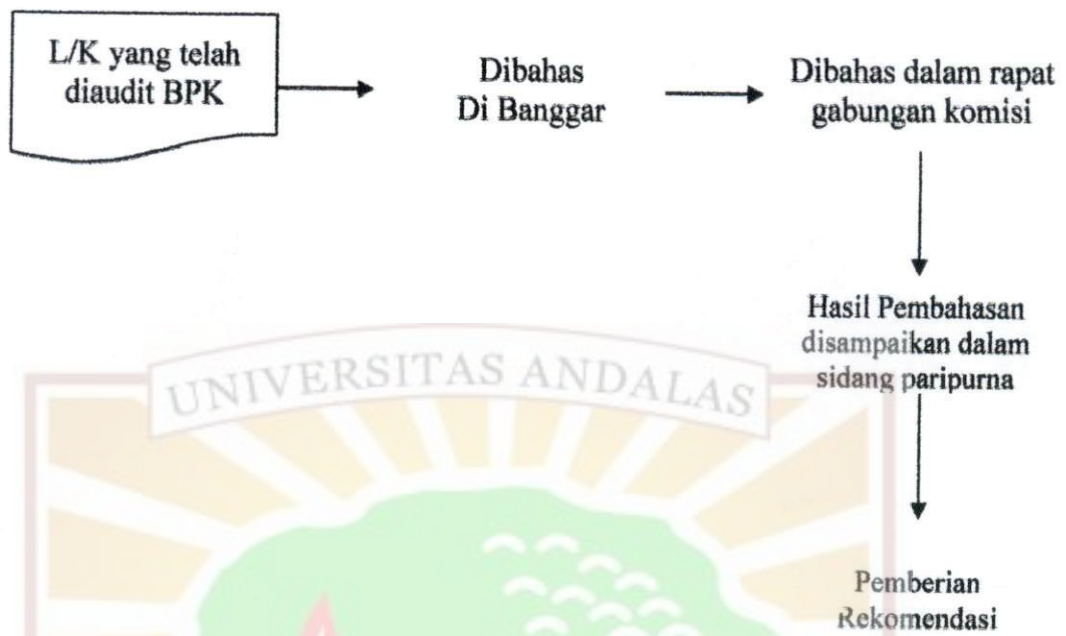
diaudit oleh BPK disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD pada sidang paripurna. Berikut beberapa mekanisme pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah:



**Gambar 4.1**  
**Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan Kota Padang**

Sesuai dengan Keputusan DPRD Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dilakukan pada sidang paripurna DPRD, kemudian dibahas dalam Pansus (Panitia Khusus) yang dibentuk yang anggotanya terdiri dari utusan komisi-komisi yang jumlahnya proporsional dengan jumlah anggota yang ada pada komisi tersebut. Selanjutnya APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwako).





**Gambar 4.2**  
**Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan Kota Bukittinggi**

Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dilakukan pada sidang paripurna DPRD, dan kemudian dibahas oleh Badan Anggaran, kemudian dibicarakan dalam rapat gabungan komisi dan hasilnya disampaikan pada sidang paripurna kembali dimana DPRD akan memberikan rekomendasi atas laporan keuangan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.

#### 4.4 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

- A. Dari Pertanyaan poin 1 apakah informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan informasi yang dibutuhkan oleh DPRD namun tidak tercantum dalam PP nomor 24 tahun 2005.

No	Jenis Informasi	Hasil Empiris	Indikator
1.	Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah	Penting	Informasi Kondisi Keuangan
2.	Dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap perekonomian	Penting	Informasi Kondisi Ekonomi
3.	Dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian	Sangat Penting	Informasi Kondisi Ekonomi
4.	Laporan keuangan telah diaudit oleh BPK	Sangat Penting	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan
5.	Adanya tindak lanjut terhadap temuan BPK	Penting	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan
6.	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah	Penting	Informasi Kinerja
7.	Evaluasi kebijakan umum anggaran	Sangat Penting	Informasi Kinerja
8.	Laporan keuangan sebagai dasar evaluasi di rapat akhir tahun	Sangat Penting	Informasi Kinerja
9.	Kesesuaian Kebijakan Umum Anggaran dengan laporan pertanggungjawaban tahun pelaporan	Penting	Informasi Kinerja
10.	Perencanaan anggaran pemerintah 5 tahun kedepan	Penting	Informasi Perencanaan Anggaran
11.	Perencanaan alokasi sumber daya	Sangat Penting	Informasi Perencanaan Anggaran
12.	Informasi target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran	Sangat Penting	Informasi Perencanaan Anggaran



	yang akan datang		
13.	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah	Sangat Penting	Informasi Perencanaan Anggaran
14.	Informasi Kebijakan Umum Anggaran pemma	Sangat Penting	Informasi Perencanaan Anggaran
15.	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah	Penting	Informasi Perencanaan Anggaran
16.	Deskripsi sebelum laporan keuangan	Penting	Informasi Naratif
17.	Kebijakan pemerintah	Penting	Informasi Naratif
18.	Informasi mengenai potensi unggulan daerah	Sangat Penting	Informasi Naratif
19.	Informasi mengenai ketersediaan infrastruktur	Sangat Penting	Informasi Naratif
20.	Informasi kondisi geografis	Penting	Informasi Naratif
21.	Informasi stabilitas keamanan didaerah	Penting	Informasi Naratif
22.	Informasi stabilitas politik	Penting	Informasi Naratif

Dari tabel diatas diketahui bahwa informasi-informasi yang penting dan sangat penting bagi responden masih ada yang belum tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Dari pertanyaan poin B berkaitan dengan jenis informasi yang dibutuhkan oleh DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan derajat kepentingan sebagai berikut :

**Tabel 4.13**  
**Jawaban Responden Atas Kebutuhan Informasi Dalam**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

No	Indikator	Rata-rata	TCR	Keterangan
1	Informasi kondisi Keuangan	4,22	84,4%	Sangat Penting
2	Informasi Kondisi Ekonomi	4,01	80,2%	Penting
3	Informasi kepatuhan Terhadap Aturan	4,46	89,3%	Sangat Penting
4	Informasi Kinerja	4,27	85,4%	Sangat Penting
5	Informasi Perencanaan Anggaran	4,25	85,1%	Sangat Penting
6	Informasi Naratif	4,05	80,7%	Penting

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa informasi kepatuhan terhadap aturan merupakan informasi yang sangat penting yang ingin diketahui oleh responden dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,46 dan Tingkat Capaian Rata-rata sebesar 89,3%, hal ini berkaitan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, diikuti dengan informasi kinerja dengan rerata sebesar 4,27 dan TCR 85,4%, informasi perencanaan anggaran dengan rerata sebesar 4,25 dan TCR sebesar 85,1% dan informasi kondisi keuangan dengan rerata sebesar 4,22 dan TCR sebesar 84,4%. Sedangkan informasi naratif dan informasi kondisi ekonomi merupakan jawaban responden dengan predikat penting dengan Tingkat Capaian Rata-rata 80,7% dan 80,2%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, responden terlebih dahulu melihat kepatuhan pemerintah dalam menggunakan dana yang berasal dari publik.



**Tabel 4.14**  
**Jawaban Responden Atas Variabel Informasi Keuangan**

No	Jenis Pertanyaan	Jawaban					
		SP	P	CK	Rata-	TCR	Ket.
		5	4	3	rata		
1	Posisi aktiva pemerintah pada akhir periode pelaporan.	29	18	-	4,60	92,1%	SP
2	Posisi hutang pemerintah pada akhir periode pelaporan.	15	22	11	4,08	81,7%	P
3	Posisi ekuitas pemerintah pada akhir periode pelaporan.	9	27	12	3,94	78,8%	P
4	Perubahan aktiva bersih/ekuitas.	23	22	3	4,42	88,3%	SP
5	Rincian hasil operasional pendapatan pemerintah selama satu periode pelaporan.	16	31	1	4,31	88,3%	SP
6	Rincian pengeluaran pemerintah selama satu periode berjalan.	16	32	-	4,33	86,7%	SP
7	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan keluar).	15	29	4	4,23	84,6%	SP
8	Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.	12	27	9	4,06	81,3%	P
9	Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah.	12	23	13	4,02	80,0%	P

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari variabel informasi keuangan, informasi yang paling penting yang ingin diketahui oleh responden adalah informasi mengenai posisi aktiva pemerintah pada akhir periode pelaporan dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,60 dengan Tingkat Capaian Rata-rata

sebesar 92,1%. Sedangkan rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah merupakan jawaban responden paling rendah dengan TCR sebesar 80,0%. Aktiva merupakan sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah. Sehingga hal ini menjadi sangat penting karena menggambarkan sumber daya yang akan digunakan.

**Table 4.15**  
**Jawaban Responden Atas Variabel Informasi Ekonomi**

No	Jenis informasi	Jawaban					
		SP	P	CP	Rata-	TCR	Ket.
		5	4	3	rata		
1	Nilai dan sumber jasa potensial yang dikelola pemerintah.	10	35	3	4,15	82,9%	P
2	Informasi kondisi perekonomian makro.	2	35	11	3,81	76,3%	P
3	Dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap perekonomian.	-	41	7	3,85	77,1%	P
4	Dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian.	16	27	5	4,23	84,6%	SP

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari informasi ekonomi, dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian merupakan informasi yang paling penting bagi DPRD dengan tingkat rata-rata jawaban responden sebesar 4,23 dengan Tingkat Capaian Rata-rata sebesar 84,6%. Sedangkan informasi perekonomian makro merupakan jawaban responden dengan TCR paling rendah yaitu sebesar 76,3%. Disini dimaksudkan bahwa setiap kebijakan pemerintah



apakah berdampak terhadap perekonomian didaerah karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

**Table 4.16**  
**Jawaban Responden Atas Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan**

No	Jenis Informasi	Jawaban					
		SP	P	CP	Rata-	TCR	Ket.
		5	4	3	rata		
1	Kesesuaian penggunaan APBD dengan peraturan perundang-undangan.	33	15	-	4,69	93,6%	SP
2	Kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.	28	15	5	4,48	89,6%	SP
3	Kepatuhan laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah.	22	25	1	4,44	88,8%	SP
4	Perbandingan pengeluaran aktual (realisasi anggaran) dengan anggaran.	25	19	4	4,44	88,8%	SP
5	Laporan keuangan telah diaudit oleh BPK.	32	16	-	4,67	93,3%	SP
6	Adanya tindak lanjut terhadap temuan BPK.	9	34	5	4,08	81,7%	P

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari variabel kepatuhan terhadap aturan, informasi yang sangat penting yang ingin diketahui adalah informasi kesesuaian penggunaan APBD dengan peraturan perundang-undangan dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,69 dengan Tingkat Capaian Rata-rata (TCR) sebesar 93,8%. Sedangkan adanya tindak lanjut terhadap temuan BPK

merupakan jawaban responden dengan TCR paling rendah yakni sebesar 81,7%. Dalam pengelolaan keuangan daerah setiap penggunaan dana yang berasal dari publik hendaknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 4.17**  
**Jawaban Responden Atas Informasi Kinerja**

No	Jenis informasi	Jawaban					
		SP	P	CP	Rata-rata	TCR	Ket.
		5	4	3			
1	Pencapaian realisasi anggaran dibanding anggaran dalam APBD.	27	18	2	4,52	90,4%	SP
2	Perbandingan kinerja keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya.	30	17	1	4,60	92,1%	SP
3	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah.	9	34	5	4,08	81,7%	P
4	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah.	31	15	2	4,60	92,1%	SP
5	Informasi pencapaian program dan rencana kerja pemerintah.	23	25	-	4,48	89,6%	SP
6	Evaluasi Kebijakan Umum Anggaran.	23	22	3	4,42	88,3%	SP
7	Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu.	6	39	3	4,06	81,3%	P
8.	Laporan keuangan sebagai dasar evaluasi di rapat akhir tahun.	18	26	4	4,29	85,8%	SP
9.	Kesesuaian Kebijakan Umum Anggaran dengan Laporan Pertanggungjawaban tahun pelaporan.	6	36	6	4,00	80,0%	P

Sumber : data primer diolah



Dari tabel diatas diketahui bahwa informasi kinerja pemda yang sangat penting yang ingin diketahui oleh responden adalah informasi mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya dan informasi mengenai evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,60 dengan Tingkat Capaian Rata-rata sebesar 92,1%. Sedangkan kesesuaian kebijakan umum Anggaran dengan laporan pertanggungjawaban akhir tahun merupakan jawaban responden dengan TCR paling rendah yakni sebesar 80,0%. Sangat penting diketahui untuk melihat *tren* kinerja keuangan pemerintah dari tahun ketahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan.

**Tabel 4.18**  
**Jawaban Responden Atas Informasi Perencanaan Anggaran**

No	Jawaban	Jawaban					
		SP	P	CP	Rata-	TCR	Ket.
		5	4	3	rata		
1	Perencanaan anggaran pemerintah 5 tahun ke depan.	7	31	10	3,94	78,8%	P
2	Perencanaan alokasi sumber daya.	16	29	3	4,27	85,4%	SP
3	Informasi target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang.	33	14	1	4,67	93,3%	SP
4	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktifitas pemerintah.	25	18	5	4,42	88,3%	SP
5	Informasi Kebijakan Anggaran Umum pemda.	23	24	1	4,46	89,2%	SP

6	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah.	6	23	19	3,73	74,6%	P
---	--	---	----	----	------	-------	---

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa informasi perencanaan anggaran yang sangat penting bagi responden adalah informasi mengenai target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,67 dan Tingkat Capaian Rata-rata 93,3%. Dan prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah merupakan jawaban responden dengan TCR paling rendah yakni sebesar 74,6%. Target penerimaan pendapatan yang akan datang sangat penting diketahui untuk mengetahui apakah pemerintah bisa memperoleh pendapatan untuk mendanai pengeluaran yang akan datang.

**Tabel 4.19**  
**Jawaban Responden Atas Informasi Naratif**

No	Jenis informasi	Jawaban					
		SP	P	CP	Rata-rata	TCR	Ket.
1.	Kebijakan akuntansi yang digunakan.	7	35	6	4,02	80,4%	P
2.	Deskripsi sebelum laporan keuangan.	1	34	13	3,75	75,0%	P
3.	Kebijakan pemerintah bidang investasi dan perpajakan.	11	35	2	4,19	83,8%	P
4.	Informasi mengenai potensi unggulan daerah.	20	27	1	4,40	87,9%	SP
5.	Informasi mengenai ketersediaan	21	26	1	4,41	88,3%	SP



	infrastruktur.						
6.	Overview operasi pemerintah.	13	34	1	4,25	85,0%	SP
7.	Informasi kondisi geografis.	1	36	11	3,79	75,8%	P
8.	Informasi pergantian manajemen pemda.	3	39	6	3,94	78,8%	P
9.	Informasi stabilitas keamanan di daerah.	2	36	10	3,83	76,7%	P
10.	Informasi stabilitas politik.	2	32	14	3,75	75,0%	P

Sumber : data primer diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa informasi naratif yang sangat penting bagi responden adalah informasi mengenai ketersediaan infrastruktur dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,41 dan Tingkat Capaian Rata-rata sebesar 88,3%, diikuti oleh informasi potensi unggulan daerah dan *overview* operasi pemerintah yang menyangkut operasi Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan jawaban responden terhadap pertanyaan deskripsi sebelum laporan memperoleh TCR paling rendah yaitu sebesar 75,0%.

Berdasarkan hasil diskusi yang penulis lakukan dengan responden maka ditemukan hal-hal sebagai berikut yang merupakan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh DPRD dan belum disampaikan dalam penyampaian laporan keuangan :

1. Berkaitan dengan asset daerah.
  - a. Informasi mengenai bukti kepemilikan terhadap asset daerah yang bersangkutan, apakah asset daerah tersebut memang betul-betul milik daerah atau tidak.
  - b. Informasi mengenai asset daerah yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga, baik informasi mengenai jenis aset, jangka waktu dan jumlah yang diterima.

- c. Informasi dalam penyajian nilai asset atau penilaian (*appraisal*) asset daerah.

Setiap tahun pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD melakukan penghapusan asset daerah, namun selama ini pemda belum pernah melakukan penilaian (*appraisal*) atas asset daerah yang dimiliki oleh orang yang ahli dalam bidang yang bersangkutan.

- d. Informasi dalam pengadaan mobiler

2. Perjanjian/kontrak kepada pihak lain yang jumlahnya signifikan.

Perjanjian terhadap pihak ketiga yang harus atas persetujuan DPRD hanyalah perjanjian yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat, sementara perjanjian yang tidak menyangkut kepentingan masyarakat merupakan perjanjian yang biasa dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melalui persetujuan dari DPRD walaupun nilainya sangat besar. Informasi inilah yang sering tidak disampaikan kepada DPRD. Padahal terkadang menyedot anggaran yang cukup besar.

3. Informasi mengenai sumber daya yang akan mengelola anggaran/program yang direncanakan. Karena selama ini setiap program yang tidak terlaksana rata-rata berkaitan dengan waktu dan sumber daya manusia.
4. Informasi mengenai keterukuran/potensi pendapatan terutama yang berasal dari perjanjian dengan pihak ketiga.

Informasi dalam penerimaan retribusi/pajak yang merupakan PAD terbesar. Misal dalam hal penerimaan pajak terutama dari pajak restoran dan PPJ (Pajak Penerangan Jalan), pemda hanya menerima hasil *netto* yang diberikan oleh pihak ketiga tanpa mengetahui berapa sebenarnya



dana yang telah dipungut oleh pihak ketiga dari masyarakat. Dalam hal ini posisi tawar pemerintah daerah rendah.

5. Informasi mengenai sumber pendapatan apabila terjadi kenaikan belanja daerah.

Kenaikan belanja terutama belanja gaji, yang aturannya berasal dari pemerintah pusat dan yang tidak seimbang dengan kenaikan Dana Alokasi Umum, sehingga kekurangan yang terjadi harus ditutup sendiri oleh pemda.

6. Informasi mengenai penanaman modal

Pemerintah daerah tidak mengikut sertakan DPRD dalam melakukan perjanjian dengan investor. Hal ini sering bermasalah terutama dalam mengukur pendapatan dan efek yang ditimbulkan kepada masyarakat.

- C. Berkaitan dengan pertanyaan poin C mengenai kebutuhan DPRD atas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut UU nomor 32 tahun 2004 DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan terhadap keputusan dan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh DPRD.

1. Berkaitan dengan Fungsi Legislasi

Yaitu fungsi membuat peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.

Hal ini dapat dilihat dalam rangka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Pertanggungjawaban APBD nantinya akan berkaitan dengan APBD-P tahun berjalan dan secara tidak langsung mempengaruhi terhadap KUA-PPAS tahun berikutnya. Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah dapat digunakan sebagai pengukuran kinerja pemerintah daerah bagi DPRD baik dari pendapatan daerah, belanja, pembiayaan dan usaha-usaha pemda dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2. Berkaitan dengan Fungsi Anggaran

Yaitu fungsi untuk menyusun anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah. DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD). Dalam hal ini anggaran bisa saja inisiatifnya berasal dari DPRD atau dari eksekutif namun hal ini tidak terlepas dari hasil evaluasi terhadap penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah periode sebelumnya sehingga APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategic dan prioritas program yang ditetapkan.

3. Berkaitan dengan Fungsi Pengawasan

DPRD bertindak sebagai lembaga pengendali/pengontrol pelaksanaan APBD, apakah APBD yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Disini pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang dan dalam melaksanakan APBD diantaranya melihat bagaimana pengguna anggaran melaksanakan kebijakan keuangan yang ditetapkan dalam undang-undang dari segi manfaat.



Pelaksanaan pengawasan bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan namun berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi. Fungsi pengawasan diharapkan bias terlaksana dengan baik untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD benar-benar telah sesuai dengan anggaran, aturan dan tujuan yang ditetapkan dan apakah sudah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasar hasil penelitian ini beberapa informasi yang dibutuhkan oleh DPRD namun tidak tercantum dalam PP Nomor 24 tahun 2005 adalah :

No	Jenis Informasi	Hasil Empiris
1.	Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah	Penting
2.	Dampak aktifitas operasional pemerintah terhadap perekonomian	Penting
3.	Dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian	Sangat Penting
4.	Laporan keuangan telah diaudit oleh BPK	Sangat Penting
5.	Adanya tindak lanjut terhadap tindak lanjut temuan BPK	Sangat Penting
6.	Evaluasi biaya pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah	Penting
7.	Perencanaan anggaran pemerintah 5 tahun kedepan	Penting
8.	Informasi target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	Sangat Penting

9.	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktifitas pemerintah	Sangat Penting
10.	Informasi Kebijakan Umum Anggaran pemda	Sangat Penting
11.	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah	Penting
12.	Deskripsi sebelum laporan	Penting
13.	Informasi mengenai potensi keunggulan daerah	Sangat Penting
14.	Informasi mengenai ketersediaan infrastruktur	Sangat Penting
15.	Informasi kondisi geografis	Penting
16.	Informasi stabilitas keamanan	Penting
17.	Informasi stabilitas politik	Penting

Untuk informasi target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang yang tidak tercantum dalam PP No. 24 tahun 2005, hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari wawancara mengenai informasi tentang keterukuran pendapatan pemerintah daerah. Sedangkan kontribusi sumber daya dalam mendukung aktivitas pemerintah juga tidak tercantum padahal masalah sumber daya terutama sumber daya manusia sering menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian program dan rencana pemda disamping waktu pelaksanaan karena menunggu pengesahan APBD. Untuk itu diharapkan penyampaian laporan keuangan dilakukan tepat waktu.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 paragraf 9 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan



suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pihak legislatif lebih membutuhkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi DPRD itu sendiri yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Demikian juga halnya dengan kedudukan DPRD yang tertuang dalam undang-undang no 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa DPRD merupakan mitra pemerintah daerah. Keputusan dan kebijakan yang nantinya akan diambil oleh DPRD sangat tergantung dengan informasi dan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Adapun informasi utama yang sangat dibutuhkan oleh DPRD dalam penelitian ini adalah :

### **1. Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan**

Terutama informasi mengenai kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan, peraturan perundang-undangan, disini dapat disimpulkan bahwa responden membutuhkan informasi penyelenggaraan APBD apakah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **2. Informasi Kinerja**

Disini pihak legislatif dapat melihat bagaimana kinerja pemda baik terhadap pengelolaan keuangan daerah maupun perbandingan kinerja sekarang dan sebelumnya. Informasi ni dibutuhkan untuk mengetahui dan memastikan

bahwa pelaksanaan APBD benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada penurunan kinerja maka DPRD dapat memberikan rekomendasi atas perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

### **3. Informasi Perencanaan Anggaran.**

Anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Pemerintah mewakili kepentingan rakyat dan anggaran pemerintah menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. DPRD membutuhkan informasi perencanaan anggaran sangat penting untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kepada program yang menjadi prioritas dalam pelaksanaannya dan perencanaan anggaran nantinya sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD.

### **4. Informasi Kondisi Keuangan**

Informasi keuangan dibutuhkan oleh DPRD berkaitan dengan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah, untuk melihat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, bagaimana pendapatan atau pengeluaran pemerintah pada periode yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk membuat keputusan alokasi sumber daya.

Berikut merupakan rincian informasi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh responden yang mana menurut Ridwan (2009) informasi dapat dikatakan sangat penting jika Tingkat Capaian Rata-rata berada pada angka 84% -100% :



**Tabel 4.20**  
**Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh DPRD**

No	Keterangan	Variabel	Rata-rata	TCR %
1.	Kesesuaian penggunaan APBD dengan peraturan perundang-undangan.	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	4,69	93,8%
2.	Informasi target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang.	Informasi Perencanaan Anggaran	4,67	93,3%
3.	Laporan keuangan telah diaudit BPK.	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	4,67	93,3%
4.	Evaluasi efisiensi program dan aktifitas pemerintah.	Informasi Kinerja	4,60	92,1%
5.	Perbandingan kinerja keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya.	Informasi Kinerja	4,60	92,1%
6.	Posisi aktiva pemerintah pada akhir periode pelaporan.	Informasi Kondisi Keuangan	4,60	92,1%
7.	Pencapaian realisasi anggaran dibanding anggaran dalam APBD.	Informasi Kinerja	4,52	90,4%
8.	Informasi pencapaian program dan rencana kerja pemerintah.	Informasi Kinerja	4,48	89,6%
9.	Kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	4,48	89,6%
10.	Informasi Kebijakan Umum Anggaran Pemda	Informasi Perencanaan Anggaran	4,46	89,2%
11.	Perbandingan pengeluaran aktual (realisasi anggaran) dengan anggaran.	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	4,44	88,8%

12.	Kepatuhan laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	4,44	88,8%
13.	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah.	Informasi Perencanaan Anggaran	4,42	88,3%
14.	Perubahan aktiva bersih/ekuitas.	Informasi Kondisi Keuangan	4,42	88,3%
15.	Evaluasi Kebijakan Umum Anggaran	Informasi Kinerja	4,42	88,3%
16.	Informasi ketersediaan infrastruktur.	Informasi Naratif	4,42	88,3%
17.	Informasi mengenai potensi unggulan daerah.	Informasi Naratif	4,39	87,9%
18.	Rincian pengeluaran pemerintah selama 1 periode berjalan.	Informasi Kondisi Keuangan	4,33	86,7%
19.	Rincian hasil operasional pendapatan pemerintah selama 1 periode berjalan.	Informasi Kondisi Keuangan	4,31	86,3%
20.	Laporan keuangan sebagai dasar evaluasi di rapat akhir tahun.	Informasi Kinerja	4,29	85,8%

Sumber : lampiran 6

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesesuaian penggunaan APBD dengan peraturan perundang-undangan disamping informasi target penerimaan pendapatan dimasa datang merupakan informasi yang sangat penting ingin dilihat oleh responden. Hal ini dimaksudkan apakah pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyajikan informasi dan didukung dengan data-data yang andal yang diperlukan dalam penyampaian. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*,



pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka kepada stakeholders atau para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tentang penggunaan keuangan publik serta peningkatan pelayanan publik.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2005 :20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah.

Dana yang dikelola oleh pemerintah merupakan dana yang berasal dari publik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjalankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintahan melibatkan dan berdampak bagi masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi dapat dilihat dari bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan yang berfokus kepada kepentingan rakyat. Semakin akuntabel laporan keuangan maka informasi yang dibutuhkan oleh dewanpun akan semakin sedikit karena pemerintah daerah telah melakukan apa yang telah digariskan dan ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah masih rendah terutama dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan, Dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada hakikatnya diharapkan dapat menjabarkan secara kuantitatif tujuan dan sasaran pemerintah atas besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Anggaran mampu menjelaskan berbagai

sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dimasyarakat untuk satu tahun pelaporan, sehingga dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dapat memberikan peningkatan kemakmuran masyarakat.

Transparansi merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukannya transparansi publik oleh pemerintah daerah, akan diperoleh informasi yang aktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk dapat membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan. Laporan keuangan yang transparan sangat penting bagi legislatif untuk dapat memperoleh informasi tentang kebijakan, efisiensi dan efektifitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan hasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat, mengevaluasi kinerja organisasi, perencanaan anggaran dan realisasinya.

Untuk dapat melaksanakan akuntabilitas dan transparansi selain yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang diharapkan keinginan dan kemauan dari pemerintah sendiri untuk dapat memperbaiki dan membenahi diri terutama dalam administrasi dan kompetensi sumber daya manusia.

Sesuai dengan fungsinya pihak legislatif membutuhkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pengawasan yakni mencegah terjadinya laporan bias atas kondisi kinerja keuangan pemda dan pengelolaan keuangan Negara (Mardiasmo, 2005). Namun disisi lain untuk dapat



melaksanakan fungsinya dengan baik DPRD juga harus membenahi diri dengan meningkatkan kompetensi diri agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepadanya.



## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN

### IMPLIKASI PENELITIAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diidentifikasi jenis-jenis informasi yang seharusnya disajikan dan disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. DPRD sebagai wakil rakyat lebih membutuhkan informasi yang lebih berfokus kepada penggunaan uang publik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Kesimpulan yang merupakan hal-hal utama dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Informasi yang dibutuhkan oleh responden masih ada yang belum tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang paling dibutuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan anggaran dan informasi keuangan.
3. DPRD membutuhkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang lebih berkaitan dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat.
4. Tingkat pendidikan dan masa kerja tidak mempengaruhi informasi yang dibutuhkan oleh DPRD atas laporan keuangan pemerintah daerah.



## 5.2. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

### a. Bagi Eksekutif

1. Menyediakan data yang andal dan bukti otentik yang diperlukan.
2. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam penyampaian laporan keuangan walaupun tidak tercantum dalam PP nomor 24 tahun 2005.
3. Adanya keinginan dan kepatuhan untuk mengikuti aturan dan prosedur yang telah digariskan oleh undang-undang.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dapat mengelola keuangan daerah.
5. Hendaknya melaporkan melalui mekanisme yang ada kepada legislatif tentang perubahan dan kegagalan terhadap program dalam kurun waktu yang ditetapkan.

### b. Bagi Legislatif

1. Meningkatkan penguasaan keuangan publik

Staf ahli memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, dan penguasaan keuangan publik perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah keuangan pemerintah yang terus berubah. Kinerja DPRD sangat diharapkan untuk menciptakan *clean governance*.

2. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan bukan pengawasan teknik seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2010. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala daerah yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yang mana metode ini memiliki keterbatasan karena dengan berbagai alasan kemungkinan responden tidak menjawab dengan keadaan yang sesungguhnya.
2. Anggota DPRD yang menjadi responden merupakan anggota yang baru dilantik pada tahun 2009, dimana kuesioner dapat diberikan pada semua anggota Badan Anggaran akan tetapi wawancara hanya bisa dilakukan kepada anggota yang telah duduk selama 2 (dua) periode.

### **5.4. Implikasi Penelitian**

Implikasi dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada DPRD di kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik daerah yang berbeda.



2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dengan mengambil sampel di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan tidak pada awal masa jabatan anggota DPRD pada periode yang bersangkutan sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih luas dari anggota dewan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, (2006), Perilaku Opportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah.
- Bastian, Indra, 2005, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Coryanata, Isma, 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar.
- Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2007, Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Penerbit UPP STIM YKPN.
- Hafiz, Abdul, Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).
- Harahap, Syofyan S, 2004, Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- <http://www.bpk.go.id>, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2009 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- <http://www.gasb.org>, 1999, Concept Statement No. 1 : Objective of Financial Reporting” in GASB Series Statement No. 34 : Basic Financial Statement- and Management’s Discussion and Analysis-for State and Local Governments.
- [http:// Criskuntadi.blogspot.com](http://Criskuntadi.blogspot.com)
- International Public Sector Accounting Standard Board (IPSAS), 2007, Presentation of Fincial Statement, issued Januari.
- Jogianto, 2004, Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman, Yogyakarta, BPFE.
- Nordiawan, Deddi, dkk, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset.
- \_\_\_\_\_, 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana GoodGovernance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 No.1 Mei.



- Martiningsih, Sri Pancawati, 2009, Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 12, Palembang.
- Mulyana, Budi, 2006, Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol 2No.1 Mei.
- Priyono, Wahyu, 2009, Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 "Standar Akuntansi Pemerintahan", Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Ridwan, 2008, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Peneliti*, Alfabeta, Bandung.
- Selvi, Dewi, 2009, *Persepsi Eksekutif dan Legislaif Mengenai Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, tesis Program Pasca Sarjana Unand.
- Sekaran, Uma, 2006, *Research Method for Business : A Skill Building Approach*, John Wiley and sons Inc. New York.
- Situmorang, Sojduangan, *Sinergi LAKIP-LPJ Bagi Perwujudan Akuntabilitas*.
- Solihin, Dadang, 2007, *Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Proses Penyusunan dan Penertapan APBD dari RPJP Sampai APBD*.
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, penerbit Andalas Lima Sisi.
- Winarna, Jaka, dkk, 2007, *Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Yuliati, Retno, dkk, 2007, *Ekspectation Gap Antara Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Auditor Pemerintah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar.





## Lampiran 1

### KUESIONER PENELITIAN

#### PENDAHULUAN

Kuesioner ini digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi Pemerintahan / Pengelolaan Keuangan Negara Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, untuk kepentingan penulisan tesis dibawah bimbingan Ibu DR. Yurniwati, SE, Msi, Ak. Dan Bapak Suhandi SE, Msi, Ak. Dengan judul "Kebutuhan Informasi Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di Sumatera Barat".

Saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberi jawaban atas berbagai pertanyaan dalam kuesioner guna kelancaran penelitian ini. Penelitian ini tidak berakibat buruk pada Bapak/Ibu/Saudara/i, identitas dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian semata.

Pada kuesioner berikut ini Bapak/Ibu/Sdr/i diminta untuk memilih masing-masing aspek tentang kebutuhan terhadap informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dengan pemberian tanda checklist (  $\checkmark$  ) pada tiap pertanyaan pada kolom-kolom yang tersedia, yaitu :

1. Pada bagian A merupakan pernyataan tentang tingkat kepentingan informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas Bapak/Ibu/Sdr/i laksanakan.
2. Pada bagian B merupakan pernyataan tentang akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan dan disampaikan kepada DPRD sebagai Badan Legislatif.
3. Pada bagian C merupakan pernyataan tentang transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hormat Saya,

WILLY NOFRANITA, SE. Ak

BP. 0821221008

## KUISIONER PENELITIAN (A)

### KEBUTUHAN INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(StudiEksplorasi Pada DPRD Kotadi ProvinsiSumateraBarat)

Data Responden :

Nama : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Komisi : \_\_\_\_\_

Bidang pendidikan : a. Ekonomi (akuntansi/non akuntansi)

b. Non ekonomi

#### 1. Pendidikan Terakhir

- a. SLTA
- b. D III
- c. S1
- d. S2/S3

#### 2. Pengalaman sebagai anggota DPRD

- 1. 0-5 thn (daritahun.....)
- 2. 6-10thn
- 3. 11-15thn
- 4. diatas 15 thn



## KUESIONER PENELITIAN (B)

### Bagian A : Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Laporan Keuangan

Petunjuk pengisian : Bapak/Ibu/Sdr/I diminta mengisi kuesioner berikut ini dengan memberi tanda (  $\checkmark$  ) pada kolom-kolom jawaban yang telah disediakan, dengan jawaban terfokus pada pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah dimana keterangannya adalah sebagai berikut :

SP = Sangat Penting

KP = Kurang Penting

P = Penting

TP = Tidak Penting

CP = Cukup Penting

### TABEL PERTANYAAN

No	Jenis Informasi	Jawaban				
		SP 5	P 4	CP 3	KP 2	TP 1
	<b>INFORMASI KONDISI KEUANGAN</b>					
1.	Posisi Aktiva pemerintah pada akhir periode pelaporan.					
2.	Posisi hutang pemerintah pada akhir periode pelaporan.					
3.	Posisi ekuitas pemerintah pada akhir periode pelaporan.					
4.	Perubahan aktiva bersih/ ekuitas					
5.	Rincian hasil operasional pendapatan pemerintah selama 1 periode pelaporan					
6.	Rincian pengeluaran pemerintah selama 1 periode berjalan.					
7.	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)					
8.	Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang					
9.	Rinci dan analisis jumlah hutang pemerintah					
	<b>INFORMASI KONDISI EKONOMI</b>					
10.	Nilai dan sumber jasa potensial yang dikelola pemerintah.					
11.	Informasi kondisi perekonomian makro.					
12.	Dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap perekonomian.					
13.	Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap perekonomian.					
	<b>INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP ATURAN</b>					
14.	Kesesuaian penggunaan APBD dengan peraturan perundang-undangan.					



15.	Kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah.					
16.	Kepatuhan Laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah					
17.	Perbandingan pengeluaran aktual (realisasi anggaran) dengan anggaran.					
18.	Laporan Keuangan telah diaudit oleh BPK					
19.	Adanya tindakan lanjut terhadap temuan BPK.					
	<b>INFORMASI KINERJA</b>					
20.	Pencapaian realisasi anggaran dibanding anggaran dalam APBD.					
21.	Perbandingan kinerja keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya					
22.	Evaluasi pelayanan (Termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah.					
23.	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah.					
24.	Informasi pencapaian program dan rencana kerja pemerintah.					
25.	Evaluasi Kebijakan Umum Anggaran.					
26.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu.					
27.	Laporan keuangan sebagai dasar evaluasi di rapat akhir tahun.					
28.	Kesesuaian Kebijakan Umum Anggaran dengan Laporan Pertanggung Jawaban tahun pelaporan.					
	<b>INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN</b>					
29.	Perencanaan alokasi sumber daya					
30.	Informasi target penerimaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang					
31.	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah.					
32.	Informasi Kebijakan Umum Anggaran pemda.					
33.	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah.					
34.	Laporan pertanggung jawaban sebagai dasar Kebijakan Umum Anggaran tahun berikutnya					
	<b>INFORMASI NARATIF</b>					
35.	Kebijakan akuntansi yang digunakan.					
36.	Deskripsi sebelum laporan keuangan.					
37.	Kebijakan pemerintah					
38.	Informasi mengenai potensi unggul daerah.					
39.	Informasi mengenai ketersediaan infrastruktur.					
40.	Overview operasi pemerintah					



41.	Informasikondisigeografis					
42.	Informasipergantianmanajemenpemda					
43.	Informasistabilitaskeamanan di daerah					
44.	Informasistabilitaspolitik					

Sumber :Martiningsih (2009) dimodifikasisesuaidengantujuanpenelitian.

Dengan tulus saya menghargai waktu dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i. Mohon periksa kembali untuk memastikan bahwa Bapak/Ibu/Sdr/i tidak melewatkan satupun pertanyaan secara tidak sengaja. Terima kasih



Lampiran 2

HASIL UJI NORMALITAS DATA

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	IE	IKE	IKA	IK	IPA	IN
N	48	48	48	48	48	48
Normal Parameters						
Mean	37.9792	11.8958	26.7917	39.0625	25.4792	28.3333
Std. Deviation	3.07003	1.07663	2.12341	2.46167	1.93500	1.79044
Most Extreme Differences						
Absolute	.089	.268	.195	.157	.131	.116
Positive	.063	.170	.097	.096	.098	.116
Negative	-.089	-.268	-.195	-.157	-.131	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z	.614	1.255	1.348	1.085	.910	.800
Asymp. Sig. (2-tailed)	.846	.072	.053	.190	.379	.544

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.





Lampiran 3

INFORMASI KONDISI KEUANGAN

Correlations

	IE1	IE2	IE3	IE4	IE5	IE6	IE7	IE8	IE9	IE
IE1 Pearson Corre	1	.325*	.182	.345*	.163	.120	.244	.077	.058	.471*
Sig. (2-tailed)		.024	.216	.016	.268	.415	.095	.604	.696	.001
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE2 Pearson Corre	.325*	1	.184	.250	.492*	.101	.296*	.206	-.039	.573*
Sig. (2-tailed)	.024		.211	.086	.000	.496	.041	.161	.794	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE3 Pearson Corre	.182	.184	1	.169	.246	.067	.361*	.393*	.172	.572*
Sig. (2-tailed)	.216	.211		.249	.092	.650	.012	.006	.243	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE4 Pearson Corre	.345*	.250	.169	1	.322*	.024	.200	.039	.000	.457*
Sig. (2-tailed)	.016	.086	.249		.026	.870	.172	.792	1.000	.001
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE5 Pearson Corre	.163	.492*	.246	.322*	1	.349*	.391*	.316*	.112	.654*
Sig. (2-tailed)	.268	.000	.092	.026		.015	.006	.029	.449	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE6 Pearson Corre	.120	.101	.067	.024	.349*	1	.251	.336*	.240	.456*
Sig. (2-tailed)	.415	.496	.650	.870	.015		.085	.020	.100	.001
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE7 Pearson Corre	.244	.296*	.361*	.200	.391*	.251	1	.287*	.531*	.717*
Sig. (2-tailed)	.095	.041	.012	.172	.006	.085		.048	.000	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE8 Pearson Corre	.077	.206	.393*	.039	.316*	.336*	.287*	1	.301*	.605*
Sig. (2-tailed)	.604	.161	.006	.792	.029	.020	.048		.038	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE9 Pearson Corre	.058	-.039	.172	.000	.112	.240	.531*	.301*	1	.503*
Sig. (2-tailed)	.696	.794	.243	1.000	.449	.100	.000	.038		.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
IE Pearson Corre	.471*	.573*	.572*	.457*	.654*	.456*	.717*	.605*	.503*	1
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.001	.000	.001	.000	.000	.000	
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## INFORMASI KONDISI EKONOMI

**Correlations**

		eko1	eko2	eko3	eko4	eko
eko1	Pearson Correlation	1	.113	.121	-.108	.446**
	Sig. (2-tailed)		.445	.414	.466	.002
	N	48	48	48	48	48
eko2	Pearson Correlation	.113	1	.327*	.212	.663**
	Sig. (2-tailed)	.445		.023	.148	.000
	N	48	48	48	48	48
eko3	Pearson Correlation	.121	.327*	1	.343*	.660**
	Sig. (2-tailed)	.414	.023		.017	.000
	N	48	48	48	48	48
eko4	Pearson Correlation	-.108	.212	.343*	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.466	.148	.017		.000
	N	48	48	48	48	48
eko	Pearson Correlation	.446**	.663**	.660**	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





## INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP ATURAN

Correlations

	Patuh 1	Patuh 2	Patuh 3	Patuh 4	Patuh 5	Patuh 6	Patuh
patuh1 Pearson Correlation	1	.411**	.382**	.459**	.572**	.358*	.810**
Sig. (2-tailed)		.004	.007	.001	.000	.012	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
patuh2 Pearson Correlation	.411**	1	.283	.189	.174	.005	.583**
Sig. (2-tailed)	.004		.051	.199	.236	.974	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
patuh3 Pearson Correlation	.382**	.283	1	.351*	.165	.237	.635**
Sig. (2-tailed)	.007	.051		.014	.263	.106	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
patuh4 Pearson Correlation	.459**	.189	.351*	1	.550**	.076	.700**
Sig. (2-tailed)	.001	.199	.014		.000	.608	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
patuh5 Pearson Correlation	.572**	.174	.165	.550**	1	.110	.645**
Sig. (2-tailed)	.000	.236	.263	.000		.455	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
patuh6 Pearson Correlation	.358*	.005	.237	.076	.110	1	.443**
Sig. (2-tailed)	.012	.974	.106	.608	.455		.002
N	48	48	48	48	48	48	48
patuh Pearson Correlation	.810**	.583**	.635**	.700**	.645**	.443**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.002	
N	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### INFORMASI KINERJA

		kinerja 1	Kinerja 2	Kinerja 3	Kinerja 4	Kinerja 5	Kinerja 6	Kinerja 7	Kinerja 9	Kinerja 10	Kinerja
kinerja1	Pearson Correlation	1	.265	.400**	.438**	.291*	.154	.037	.160	.000	.599**
	Sig. (2-tailed)		.068	.005	.002	.045	.297	.804	.277	1.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja2	Pearson Correlation	.265	1	.411**	.172	.087	.124	.017	.421**	.000	.578**
	Sig. (2-tailed)	.068		.004	.243	.557	.400	.908	.003	1.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja3	Pearson Correlation	.400**	.411**	1	.178	.085	.086	-.205	.245	.000	.511**
	Sig. (2-tailed)	.005	.004		.227	.567	.562	.162	.093	1.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja4	Pearson Correlation	.438**	.172	.178	1	.228	.116	.016	-.028	.293*	.510**
	Sig. (2-tailed)	.002	.243	.227		.119	.433	.914	.853	.043	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja5	Pearson Correlation	.291*	.087	.085	.228	1	.097	.249	.020	.167	.411**
	Sig. (2-tailed)	.045	.557	.567	.119		.510	.087	.893	.257	.004
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja6	Pearson Correlation	.154	.124	.086	.116	.097	1	.220	.066	.206	.432**
	Sig. (2-tailed)	.297	.400	.562	.433	.510		.132	.658	.160	.002
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja7	Pearson Correlation	.037	.017	-.205	.016	.249	.220	1	.169	.194	.348*
	Sig. (2-tailed)	.804	.908	.162	.914	.087	.132		.251	.185	.015
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja9	Pearson Correlation	.160	.421**	.245	-.028	.020	.066	.169	1	.136	.573**
	Sig. (2-tailed)	.277	.003	.093	.853	.893	.658	.251		.355	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja10	Pearson Correlation	.000	.000	.000	.293*	.167	.206	.194	.136	1	.395**
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	1.000	.043	.257	.160	.185	.355		.005
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
kinerja	Pearson Correlation	.599**	.578**	.511**	.510**	.411**	.432**	.348*	.573**	.395**	1



Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.004	.002	.015	.000	.005	
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



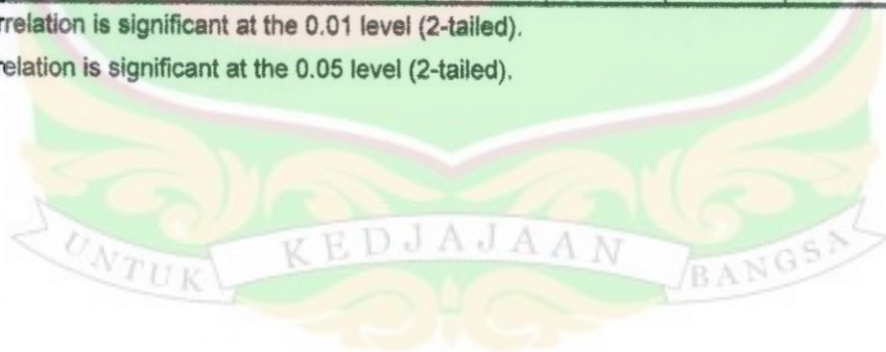
## INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN

### Correlations

	IPA1	IPA2	IPA3	IPA4	IPA5	IPA6	IPA
IPA1 Pearson Correlation	1	.050	.069	.223	-.237	.273	.449**
Sig. (2-tailed)		.734	.644	.128	.105	.060	.001
N	48	48	48	48	48	48	48
IPA2 Pearson Correlation	.050	1	.452**	.032	.344*	.303*	.647**
Sig. (2-tailed)	.734		.001	.830	.017	.036	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
IPA3 Pearson Correlation	.069	.452**	1	.342*	.251	-.081	.586**
Sig. (2-tailed)	.644	.001		.017	.085	.585	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
IPA4 Pearson Correlation	.223	.032	.342*	1	-.010	.158	.574**
Sig. (2-tailed)	.128	.830	.017		.948	.282	.000
N	48	48	48	48	48	48	48
IPA5 Pearson Correlation	-.237	.344*	.251	-.010	1	.055	.393**
Sig. (2-tailed)	.105	.017	.085	.948		.708	.006
N	48	48	48	48	48	48	48
IPA6 Pearson Correlation	.273	.303*	-.081	.158	.055	1	.573**
Sig. (2-tailed)	.060	.036	.585	.282	.708		.000
N	48	48	48	48	48	48	48
IPA Pearson Correlation	.449**	.647**	.586**	.574**	.393**	.573**	1
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.006	.000	
N	48	48	48	48	48	48	48

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





Lampiran 4

**HASIL UJI RELIABILITAS  
INFORMASI KONDISI KEUANGAN**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.714	.728	9

**INFORMASI KONDISI EKONOMI**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.515	.524	3

## INFORMASI KEPATUHAN KEPADA PERATURAN

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.689	.608	6

## INFORMASI KINERJA

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.623	.315	9



## INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.504	.394	6

## INFORMASI NARATIF

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	48	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	48	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.535	.464	10



## Master Jawaban Responden

No	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Informasi Keuangan									Jumlah	Informasi Kondisi Ekonomi				Jumlah	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan						Jumlah	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4		1	2	3	4	5	6		
1	ketua	S2	6-10 thn	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	43	4	4	4	5	17	5	5	5	5	5	5	30
2	wakil	S1	6-10 thn	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	39	4	4	4	5	17	5	4	5	5	5	4	28
3	wakil	S1	6-10 thn	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	39	4	4	4	4	16	5	5	5	4	5	4	28
4	anggota	D3	0-5 thn	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	5	17	4	5	4	4	5	4	26
5	anggota	S2	0-5 thn	4	4	3	3	4	5	3	3	3	3	32	4	3	4	4	15	4	3	5	5	5	3	25
6	anggota	S1	0-5 thn	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	36	3	3	3	4	13	4	4	4	3	4	4	26
7	anggota	S2	0-5 thn	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	32	4	4	3	3	14	5	5	5	5	5	4	23
8	anggota	SMU	0-5 thn	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	37	3	4	4	5	16	5	5	5	5	5	3	28
9	anggota	S1	6-10 thn	5	3	4	5	5	5	5	4	5	4	41	5	4	4	5	18	5	5	5	5	5	4	29
10	anggota	S1	0-5 thn	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	39	4	4	4	4	16	4	4	4	3	4	4	23
11	anggota	S1	6-10 thn	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	16	4	4	4	3	4	4	23
12	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	5	5	5	5	5	3	40	4	4	3	4	15	5	4	4	5	5	3	26	
13	anggota	S1	0-5 thn	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	32	4	3	4	3	14	4	3	4	3	4	4	22
14	anggota	SMU	0-5 thn	5	3	3	5	4	4	4	4	4	4	36	4	4	3	4	15	5	5	4	5	5	4	28
15	anggota	SMU	6-10 thn	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	4	27	
16	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37	4	4	4	4	16	5	4	4	5	5	4	27
17	anggota	S1	0-5 thn	5	4	3	4	4	4	4	3	3	34	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	4	29	
18	ketua	S1	6-10 thn	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	38	4	4	4	4	16	5	5	4	5	5	4	28
19	wakil	S2	6-10 thn	4	4	4	5	4	4	3	4	3	35	5	3	4	4	16	5	5	4	5	5	4	28	
20	wakil	S1	0-5 thn	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	33	4	4	4	5	17	4	4	3	5	5	3	24
21	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	5	3	5	37	4	3	3	5	15	5	4	4	4	5	4	26	
22	anggota	SMU	0-5 thn	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	37	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	4	25
23	anggota	S1	0-5 thn	5	4	4	4	4	5	4	5	4	39	4	5	4	4	17	4	5	4	4	4	4	4	25
24	anggota	S1	0-5 thn	5	5	3	5	4	4	4	3	3	36	4	3	3	3	13	4	3	4	4	4	4	4	23
25	anggota	S1	0-5 thn	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	33	3	3	4	4	14	4	5	5	4	4	4	26
26	anggota	S1	0-5 thn	5	3	4	4	4	4	5	4	5	38	4	4	4	4	16	5	5	4	4	5	4	4	26
27	ketua	S2	6-10 thn	5	4	4	5	5	5	4	5	4	41	5	4	4	5	18	5	5	5	4	5	4	4	28
28	wakil	S2	6-10 thn	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	41	4	3	4	5	18	5	5	5	4	5	4	28
29	wakil	S1	0-5 thn	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34	4	4	4	5	16	4	3	4	4	4	4	4	23
30	anggota	S1	6-10 thn	5	5	4	5	5	4	4	5	5	42	5	4	4	4	17	5	5	5	5	5	5	4	25
31	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	3	5	5	5	4	4	5	41	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	30	
32	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37	4	4	4	5	17	5	4	4	4	5	4	29	
33	anggota	S1	6-10 thn	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	3	4	4	15	4	4	4	5	4	4	4	25
34	anggota	S1	6-10 thn	5	5	5	4	5	4	5	5	4	42	4	4	4	5	17	5	5	5	5	5	5	30	
35	anggota	SMU	0-5 thn	4	5	4	5	5	4	4	5	4	40	5	4	4	4	17	5	4	4	5	5	5	5	28
36	anggota	D3	0-5 thn	4	4	5	5	5	4	4	4	3	38	4	5	4	5	18	5	4	4	4	4	4	4	25
37	ketua	S1	6-10 thn	5	4	4	5	4	5	4	4	4	39	4	4	4	4	16	5	5	4	4	5	4	4	27
38	wakil	S2	6-10 thn	4	5	4	4	5	5	5	4	5	41	4	4	4	4	16	5	5	4	4	5	4	4	27
39	wakil	S1	0-5 thn	5	5	3	5	4	4	4	3	3	36	4	3	4	5	16	4	4	4	3	4	4	4	23
40	anggota	S1	0-5 thn	5	5	4	4	5	4	5	4	3	39	5	3	3	3	14	5	3	5	5	5	5	5	28
41	anggota	S1	6-10 thn	5	5	5	4	5	5	5	4	5	43	5	4	4	5	18	5	4	4	4	5	5	5	28
42	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	3	4	4	4	4	4	3	36	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	5	5	27
43	anggota	S1	0-5 thn	5	4	5	5	4	5	5	5	4	43	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	4	4	25
44	anggota	D3	0-5 thn	5	5	4	5	5	4	5	4	4	41	5	4	4	3	16	5	5	5	4	4	4	4	27
45	anggota	S1	0-5 thn	5	5	3	5	5	5	5	5	5	43	4	4	4	4	16	5	5	4	5	5	5	5	29
46	anggota	SMU	0-5 thn	4	4	4	5	5	5	5	4	3	38	5	4	4	4	17	5	5	5	5	5	5	4	28
47	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	5	4	4	4	4	5	4	40	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	5	30
48	anggota	SMU	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	5	17	5	5	5	4	4	4	4	27
Jumlah				221	196	189	212	207	208	203	195	192	1823	199	183	185	203	770	225	215	213	213	224	196	1286	
Rata-rata				4.604	4.083	3.938	4.417	4.313	4.333	4.229	4.063	4.000	4.220	4.146	3.813	3.854	4.229	4.010	4.688	4.479	4.438	4.438	4.657	4.083	4.465	
Tingkat Capaian Rata-rata (TCR)				92.1%	81.7%	78.8%	88.3%	86.3%	85.7%	84.5%	81.3%	80.0%	84.4%	82.9%	76.3%	77.1%	84.6%	80.2%	93.8%	89.6%	88.8%	88.8%	93.3%	81.7%	89.3%	



No	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Informasi Kinerja										Jumlah	Informasi Perencanaan Anggaran							Jumlah
				1	2	3	4	5	5	7	8	9	10		1	2	3	4	5	6	7	
1	ketua	S2	6-10 thn	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	42	5	5	5	4	4	4	5	32
2	wakil	S1	6-10 thn	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	46	4	5	5	5	5	4	4	32
3	wakil	S1	6-10 thn	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42	4	4	4	4	4	4	4	29
4	anggota	D3	0-5 thn	5	5	5	5	4	5	4	3	5	4	45	4	5	5	3	5	3	4	29
5	anggota	S2	0-5 thn	5	4	4	5	5	5	4	3	3	5	43	4	5	5	5	5	5	4	33
6	anggota	S1	0-5 thn	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48	4	4	5	5	5	4	4	31
7	anggota	S2	0-5 thn	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	45	3	5	5	5	5	3	3	29
8	anggota	SMU	0-5 thn	5	4	4	5	5	4	4	3	3	4	41	4	5	5	5	5	3	4	31
9	anggota	S1	6-10 thn	4	5	4	3	5	5	4	4	4	3	41	3	4	5	5	5	4	5	31
10	anggota	S1	0-5 thn	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	36	4	4	3	3	4	4	4	26
11	anggota	S1	6-10 thn	4	3	4	5	4	5	4	4	3	4	40	4	5	5	3	4	4	4	29
12	anggota	S1	0-5 thn	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	43	5	3	4	4	4	3	4	27
13	anggota	S1	0-5 thn	5	5	5	5	5	5	3	3	5	4	45	3	4	5	4	5	3	4	28
14	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	44	4	4	5	5	5	3	4	30
15	anggota	SMU	6-10 thn	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	45	4	5	5	5	5	4	4	32
16	anggota	S1	6-10 thn	5	5	4	5	4	5	4	4	4	3	43	4	4	5	4	5	3	4	29
17	anggota	S1	0-5 thn	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43	3	4	4	4	4	3	4	26
18	ketua	S1	6-10 thn	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43	5	4	5	5	4	4	4	31
19	wakil	S2	6-10 thn	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	43	4	5	5	5	5	4	4	32
20	wakil	S1	0-5 thn	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	43	3	4	5	4	4	3	4	27
21	anggota	S1	0-5 thn	5	5	4	5	5	3	4	5	4	3	43	4	3	4	5	4	3	5	28
22	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	46	4	4	5	5	4	4	4	30
23	anggota	S1	0-5 thn	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	42	4	4	4	4	5	4	5	30
24	anggota	S1	0-5 thn	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	37	4	3	4	5	3	3	4	26
25	anggota	S1	0-5 thn	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	42	3	4	5	5	4	4	5	30
26	anggota	S1	0-5 thn	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	46	4	4	5	4	4	3	4	28
27	ketua	S2	6-10 thn	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	44	4	4	4	5	5	4	4	30
28	wakil	S2	6-10 thn	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	38	4	5	5	5	4	5	4	32
29	wakil	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41	4	4	5	5	5	4	5	32
30	anggota	S1	6-10 thn	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	43	4	4	5	4	4	4	4	29
31	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	4	5	4	4	3	4	4	5	43	4	5	5	5	4	4	4	31
32	anggota	S1	6-10 thn	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	43	4	4	5	5	5	3	4	30
33	anggota	S1	6-10 thn	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	45	4	5	5	4	5	5	4	32
34	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	4	4	5	4	4	4	5	30
35	anggota	SMU	0-5 thn	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	44	5	4	4	5	4	5	5	32
36	anggota	D3	0-5 thn	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	45	4	4	4	5	4	5	5	31
37	ketua	S1	6-10 thn	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43	4	5	5	4	5	3	4	30
38	wakil	S2	6-10 thn	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	43	4	4	4	4	4	4	5	29
39	wakil	S1	0-5 thn	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	36	3	4	5	4	5	3	4	28
40	anggota	S1	0-5 thn	4	4	3	5	5	5	5	3	4	5	43	3	4	4	3	5	4	5	28
41	anggota	S1	6-10 thn	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	46	5	4	5	4	4	3	5	30
42	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	46	4	4	5	5	4	3	4	29
43	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	42	4	5	5	5	4	3	4	30
44	anggota	D3	0-5 thn	4	5	3	5	5	5	5	4	5	5	46	3	4	4	3	5	4	5	28
45	anggota	S1	0-5 thn	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43	5	5	5	5	5	5	5	35
46	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	46	4	5	4	4	4	4	5	30
47	anggota	SMU	0-5 thn	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	43	3	4	4	4	4	3	4	26
48	anggota	SMU	0-5 thn	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	5	4	5	5	4	4	4	31
Jumlah				217	221	196	221	215	212	195	187	206	192	2062	189	205	224	212	214	179	206	1429
Rata-rata				4.521	4.604	4.083	4.604	4.479	4.417	4.063	3.896	4.292	4.000	4.296	3.938	4.271	4.667	4.417	4.458	3.729	4.292	4.253
Tingkat Capaian Rata-rata (TCR)				90.4%	92.1%	81.7%	92.1%	89.6%	88.3%	81.3%	77.9%	85.8%	80.0%	85.9%	78.8%	85.4%	93.3%	88.3%	89.2%	74.6%	85.8%	85.1%



No	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Informasi Naratif												Jumlah
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ketua	S2	6-10 thn	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
2	wakil	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50
3	wakil	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
4	anggota	D3	0-5 thn	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	46
5	anggota	S2	0-5 thn	3	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	49
6	anggota	S1	0-5 thn	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	49
7	anggota	S2	0-5 thn	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	3	48
8	anggota	SMU	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	47
9	anggota	S1	6-10 thn	4	4	5	4	5	5	5	3	4	3	3	3	48
10	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	50
11	anggota	S1	6-10 thn	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
12	anggota	S1	0-5 thn	4	3	4	3	4	5	5	3	4	4	4	3	46
13	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	47
14	anggota	SMU	0-5 thn	3	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	47
15	anggota	SMU	6-10 thn	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	45
16	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
17	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	47
18	ketua	S1	6-10 thn	4	3	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	46
19	wakil	S2	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	49
20	wakil	S1	0-5 thn	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	4	3	45
21	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	49
22	anggota	SMU	0-5 thn	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	45
23	anggota	S1	0-5 thn	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	48
24	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
25	anggota	S1	0-5 thn	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	49
26	anggota	S1	0-5 thn	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
27	ketua	S2	6-10 thn	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	52
28	wakil	S2	6-10 thn	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	48
29	wakil	S1	0-5 thn	4	4	5	4	5	5	5	3	4	4	4	4	51
30	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	47
31	anggota	SMU	0-5 thn	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
32	anggota	S1	6-10 thn	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	50
33	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	49
34	anggota	S1	6-10 thn	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	50
35	anggota	SMU	0-5 thn	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	54
36	anggota	D3	0-5 thn	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	52
37	ketua	S1	6-10 thn	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	50
38	wakil	S2	6-10 thn	4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	45
39	wakil	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
40	anggota	S1	0-5 thn	5	3	5	5	5	4	3	4	4	3	3	3	47
41	anggota	S1	6-10 thn	4	4	5	5	3	3	4	4	4	3	4	5	48
42	anggota	SMU	0-5 thn	3	3	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	47
43	anggota	S1	0-5 thn	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	54
44	anggota	D3	0-5 thn	5	3	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	49
45	anggota	S1	0-5 thn	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49
48	anggota	SMU	0-5 thn	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	53
47	anggota	SMU	0-5 thn	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	46
48	anggota	SMU	0-5 thn	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	51
Jumlah				193	180	201	201	211	212	204	182	187	189	184	180	2324
Rata-rata				4.021	3.750	4.188	4.188	4.396	4.417	4.250	3.792	3.896	3.938	3.833	3.750	4.035
Tingkat Capaian Rata-rata (TCR)				80.4%	75.0%	83.8%	83.8%	87.9%	88.3%	85.0%	75.8%	77.9%	78.8%	76.7%	75.0%	80.7%

